

BAB I

MASALAH PENELITIAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha memobilisasi dana masyarakat untuk keperluan pembangunan di Indonesia adalah melalui pasar modal. Sejak digulirkannya paket kebijakan deregulasi pemberian kemudahan bagi perusahaan untuk *go public* pada tahun 1987 yang lalu, kegiatan pasar modal telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah emiten di pasar modal, yaitu sebelum paket deregulasi pada tahun 1988 hanya tercatat 24 emiten, telah meningkat menjadi 225 emiten pada tahun 1995 dan lebih dari 400 emiten pada Tahun 2008. Proporsi terbesar dari jumlah emiten pada Tahun 2008 adalah industri sektor manufaktur sebanyak 140 emiten atau 35 % (www.Bapepam.com), dengan demikian emiten sektor manufaktur memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan pasar modal di Indonesia.

Rata-rata nilai perdagangan saham harian pada periode 1999 hingga Juni 2005 menunjukkan *trend* yang terus meningkat, transaksi harian pada periode ini berada pada kisaran Rp794,43 miliar per hari dengan volume saham berkisar 1,03 miliar lembar per hari (Bapepam, 2005). Perkembangan ini menunjukkan semakin pentingnya peran masyarakat sebagai investor di pasar modal dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

Dalam menentukan keputusan transaksi di pasar modal, investor akan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya, di antaranya informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh pada laporan keuangan emiten.

Informasi pada laporan keuangan sangat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Bagi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan media informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan. Sejauh mana informasi dapat diperoleh tergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) pada laporan keuangan emiten.

Dalam Tahun 2004 sampai dengan Maret 2005, Bapepam mencatat ada 44 kasus pelanggaran pasar modal, 24 di antaranya telah berhasil diselesaikan, periksa Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kasus Pasar Modal yang Diselesaikan oleh Bapepam
Periode 2004 Sampai dengan Maret 2005.

No.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PELANGGARAN	PASAL PELANGGARAN
1	PT.Wahana Jaya Perkasa TBK (UGAR)*	Keterbukaan informasi.	UUPM pasal 91, 92
2	PT.Ever Shinetex Tbk (ESTI)*	Keterbukaan informasi.	Idem
3	PT Siwani Makmur Tbk *	Keterbukaan informasi	Idem
4	PT Bank Internasional	Keterbukaan informasi	Idem
5	PT.Jembo Calbe Company Tbk*	Keterbukaan informasi	Idem
6	PT. Daya Guna Samudra Tbk dan PT. Bintuni Minaraya Tbk	Benturan kepentingan	Per.Bapepam No.IX E
7	PT.Suryamas Dutamakmur Tbk	Pelanggaran pasal 68 , 107 UUPM	
8	PT. Daeyu Orchid Indonesia Tbk	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum	Per.Bapepam No.X.K.4
9	PT. Indo exchange Tbk	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum	Per.Bapepam No.X.K.4
10	PT .Kasogi International Tbk*	Penyajian Lap.Keuangan, serta UUPM pasal 68,69, 107.	Per.Bapepam No. VIII.G.7
11	PT. Great Golden Star Tbk	Penyajian Lap. Keuangan	Idem
12	PT.Davomas*	Penyajian Lap.Keuangan	Idem
13	PT.Great River International Tbk	Benturan kepentingan, serta pelanggaran terhadap UUPM 68,69	Per.Bapepam No.IX E
14	PT.Dynaplast, Tbk *	Benturan kepentingan	Idem
15	PT.Surabaya Agung Industri *	Pelanggaran UUPM	Idem
16	PT. General Capital Indonesia	Benturan kepentingan	Idem

Lanjutan Tabel 1.1

No	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PELANGGARAN	PASAL PELANGGARAN
17	PT. Sinar Mas Multiartha Tbk	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum	Per.Bapepam No.X.K.4
18	PT. Ryane Adibusana Tbk	Penyajian Lap.Kuangan.	No. VIII.G.7
19	PT.Ades Alfindo Putrasetia Tbk *	Idem	Idem
20	PT.Indofarma Tbk*	Idem	Idem
21	PT. Hortus Danavest Tbk	Transaksi materai dan perubahan kegiatan utama	Per.Bapepem IX.E.2
22	PT .Maespierson-Finas Investment Management	Nilai pasar efek portofolio reksa dana kontrak investasi kolektif.	UUPM pasal 27.
23	PT. Davomas Abadi,Tbk*	Pelanggaran terhadap UUPM	Pasal 96,97
24	PT.Danareksa Investment Mgt, dll. (lihat lap.Bapepam)	Pengumuman harian nilai aktiva bersih reksa dana terbuka	UUPM pasal 24

Keterangan : -Sumber :Laporan Tahunan 2004 Bapepam yang diolah kembali

- * Perusahaan Industri sektor manufaktur

Terdapat 15 kasus dari 24 kasus pasar modal yang telah diselesaikan menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan. Sementara dari 20 kasus yang masih dalam proses pemeriksaan, di antaranya terdapat 11 kasus serupa. Dengan demikian, dari 44 kasus pada periode ini hampir 60% berkaitan dengan benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan (Bapepam, 2005). Benturan kepentingan dan tidak diungkapkannya informasi penting akan menyebabkan kerugian bagi pihak investor eksternal. Dari jumlah perusahaan yang tersangkut kasus pada tahun 2005 tersebut 42% adalah perusahaan industri sektor manufaktur, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap sektor manufaktur mengingat emiten di sektor ini jumlahnya paling besar, sehingga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia.

Hasil survey *Pricewaterhouse and Coopers* terhadap investor-investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu

yang terendah dalam bidang standar pengungkapan dan transparansi, serta penerapan *auditing*. Posisi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya dan Australia dalam hal praktik pengungkapan dalam laporan keuangan, Indonesia dikelompokkan pada kelompok paling buruk bersama dengan Thailand, China dan India (FCGI,2004).

Pengungkapan dalam laporan keuangan akan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebagai efek dari efisiensi pasar modal. Beberapa hasil riset telah memberikan kesimpulan bahwa pengungkapan sukarela berguna untuk mengurangi kesenjangan informasi antar para pelaku pasar modal, sehingga investor percaya bahwa transaksi saham di pasar modal terjadi pada harga yang wajar. Kepercayaan investor ini kemudian akan diikuti dengan peningkatan likuiditas saham (Jiambalvo,1996), penurunan biaya modal (Botosan, 1997), dan pada akhirnya menciptakan pasar modal yang efisien (Healy, 1999 dan Bailey, 2002).

Rendahnya pengungkapan timbul sebagai dampak adanya ketidakselarasan kepentingan antar pemilik dan manajemen. Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut adalah dengan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*=GCG) (Beneish, 2001). *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman atau kreditor (*bondholders*), dapat memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh manajemen, atau dengan kata lain

bagaimana pemegang saham dan kreditor perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Dallas, 2004).

Mekanisme *corporate governance* dapat meliputi mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal dapat meliputi; struktur dewan komisaris, struktur kepemilikan, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi. Mekanisme eksternal dapat meliputi; pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, pendanaan dengan hutang (*debt financing*), pelaksanaan audit oleh auditor eksternal (Babic, 2001 dan Claessens, 2002).

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk mengarahkan manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas (Claessens, 2002). Penerapan *GCG* diharapkan dapat mencegah pengambil alihan hak pemegang saham (*expropriation*) oleh manajemen, termasuk mencegah praktik manajemen laba. *Good corporate governance* dapat mendorong manajemen untuk bersikap transparan dalam penyajian laporan keuangan (Dallas, 2004).

Berdasarkan uraian di atas yaitu terdapat fenomena banyaknya kasus pasar modal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan, maka diperlukan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, karakteristik Dewan Komisaris, dan kualitas audit terhadap pengungkapan secara sukarela.

Menurut teori keagenan pemisahan fungsi kepemilikan dengan pengendalian akan menimbulkan konflik keagenan antar pemilik dengan manajer, terutama pada bentuk kepemilikan saham menyebar konflik ini terjadi karena pemegang saham tidak dapat mengendalikan manajemen, mengingat *voting power* pemegang saham yang kecil. Untuk mengatasi konflik ini, maka kepemilikan institusional ditempuh sebagai salah satu mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi konflik kepentingan antar pemegang saham dengan manajemen.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi dorongan atau insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri dengan tingkat monitoring yang lebih tinggi (intens) dari pada investor individu (Bushee, 1988). Hal ini karena investor institusional mempunyai cara berfikir analitis dan metode yang canggih (*sophisticated*), terutama kemampuannya dalam mendapatkan dan memproses informasi. Shiller dan Pound (1989) menunjukkan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak untuk melakukan analisis investasi yang kompleks dan memiliki akses untuk mendapatkan informasi informasi yang terlalu mahal bagi investor individual. Peran investor institusional dengan demikian dapat menekan kecenderungan manajemen menyembunikan informasi penting dalam pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia lebih menekankan pada pengaruh konsentrasi kepemilikan oleh kelompok tertentu terhadap manajemen laba, dengan memberikan hasil yang berbeda. Penelitian Veronica dan Siddharta (2005) di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata manajemen laba pada perusahaan

dengan kepemilikan keluarga dan bukan perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata manajemen laba pada perusahaan lain.

Kepemilikan saham oleh kelompok tertentu dapat menjadi mekanisme *corporate governance* jika di antara pemegang saham terdapat keselarasan kepentingan. Musnadi (2006) menyatakan bahwa semakin banyak *blockholder* bergabung dalam struktur kepemilikan perusahaan, dapat memperkecil kontribusi struktur kepemilikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Mengecilnya kontribusi ini disebabkan munculnya persoalan keagenan antar *blockholder*, baik karena adanya *asymmetric information*, maupun terdapatnya konflik yang saling menjatuhkan dan saling bersaing antar *blockholder*. Hal ini bermakna, konsentrasi kepemilikan oleh kelompok *blockholder* dapat melemahkan efektivitas pengendalian pemegang saham, jika diantara mereka terdapat ketidak selarasan kepentingan, sehingga terjadinya percekocokan antar mereka.

Penelitian hubungan konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan, hasilnya belum konsisten. Wei *et al* (2002) meneliti hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan secara sukarela. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik di Hongkong dan Singapura. Hasilnya menunjukkan, terdapat hubungan negatif antar konsentrasi kepemilikan dengan luas pengungkapan. Eng (2003) dan Sam Han (2005) menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan di pihak *insider*, akan semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan karena pihak *insider* memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan keuangan.

Mohd (2005) meneliti hubungan konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan sukarela, dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Malaysia. Hasil penelitiannya menemukan hubungan positif antar konsentrasi kepemilikan dengan luas pengungkapan. Konsentrasi kepemilikan akan mengurangi konflik kepentingan, dan pemegang saham pengendali akan mendorong pengungkapan informasi untuk mengurangi asimetri informasi dengan pemegang saham minoritas.

Karakteristik dewan komisaris dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tingkat pengungkapan informasi. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Karakteristik Dewan diantaranya meliputi : (1) komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan ; (2) Jumlah anggota Komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan ditujukan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Eng dan Mark (2003), Cheng dan Stephen (2004) menguji hubungan proporsi komisaris independen dengan luas pengungkapan pada laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan luas pengungkapan. Artinya semakin besar proporsi komposisi komisaris independen mendorong semakin luas pengungkapan pada laporan keuangan. John dan Senbet 1998 (Cheng dan Stephen 2004) mengemukakan bahwa semakin besar proporsi *outside directors* akan mempunyai kemampuan

mengawasi yang lebih besar. Jumlah komposisi *outside directors* dapat merepresentasikan independensi dewan dalam mekanisme pengawasan terhadap manajemen.

Ukuran Dewan komisaris dapat berperan penting untuk efektivitas fungsi pengawasan Dewan. Semakin banyak jumlah anggota Dewan komisaris memungkinkan untuk dapat melakukan layanan pengawasan yang lebih baik. Klein (2002) mengemukakan bahwa penugasan dewan dipengaruhi oleh jumlah dewan. Jika jumlah anggota dewan banyak memudahkan untuk pendistribusian anggota Dewan pada berbagai komisi yang diperlukan. Dengan anggota komisi yang memadai maka memungkinkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Sehingga Jumlah anggota dewan dapat berhubungan positif dengan pengungkapan.

Dilain pihak, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah anggota komisaris berhubungan negatif dengan kemampuan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk pengawasan terhadap pelaporan keuangan, dengan alasan semakin banyak anggota Dewan akan menyulitkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Lipton (1992).

Fungsi auditor adalah sebagai pihak yang memberikan kepastian terhadap integritas informasi pada pelaporan keuangan *auditee*, dan kemudian informasi ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kontrak antar agen dan prinsipal. Berdasarkan teori keagenan tampak jelas bahwa peran auditor dalam memberikan jasa atestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen. Menurut Defond (1992), Auditor diharapkan memberikan pandangan yang independen tentang

kesahihan angka-angka yang disajikan. Auditor dapat melakukan fungsinya dengan benar jika dapat melakukan audit yang berkualitas.

Terdapat dua proksi yang sering digunakan dalam penelitian tentang kualitas audit yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan spesialisasi jasa audit KAP pada kelompok industri tertentu (selanjutnya akan digunakan istilah spesialisasi industri KAP). Para peneliti di Indonesia sepanjang yang penulis temui menggunakan ukuran KAP sebagai proksi dari kualitas audit, dengan hasil penelitian yang belum konsisten. Karena itu, penelitian tentang kualitas audit dengan menggunakan proksi lain diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian bidang akuntansi dan *auditing*.

Penelitian ini menggunakan spesialisasi industri KAP sebagai proksi kualitas audit. Penggunaan spesialisasi industri KAP sebagai proksi dari kualitas audit diharapkan dapat memberikan hasil pengukuran kualitas audit yang lebih baik. Penggunaan ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit pada penelitian terdahulu mendapatkan kritikan setelah merebaknya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan besar yaitu Arthur Andersen.

Hogan dan Jeter 1999 menunjukkan bahwa spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (*industry specialization audit Firm*) pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik membuat auditor mampu menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-spesialisasi industri KAP (Mayhew dan Wilkins, 2003). *Trend* peningkatan spesialisasi ditunjukkan dengan peningkatan

kompetensi diantara kantor akuntan. Karena itu, spesialisasi industri KAP dapat dijadikan proksi dari kualitas audit.

Penelitian pengaruh kualitas audit terhadap luas pengungkapan dalam laporan keuangan di antaranya dilakukan oleh Bauhede dan Willekens (2003) di Belgia, Wei dan Gray (2005) di China. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa audit yang berkualitas mempengaruhi luas pengungkapan dalam laporan keuangan. Proksi yang digunakan oleh kedua penelitian tersebut adalah ukuran KAP (*Big Five auditors*).

Susilowaty dan Moris (2005) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi perusahaan, studi banding antar perusahaan publik di Australia dengan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki hubungan positif dengan tingkat transparansi. Artinya bahwa audit yang berkualitas dapat meningkatkan transparansi pada laporan keuangan. Sayangnya, penelitian mereka memiliki keterbatasan dalam sampel yang digunakan yaitu hanya menggunakan 30 perusahaan terkemuka di kedua negara. Sehingga peneliti sendiri mengingatkan untuk berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil penelitiannya. Untuk itu, penelitian di Indonesia masih diperlukan agar diperoleh bukti empiris yang lebih memadai.

Penelitian mengenai tema *corporate governance* masih menarik untuk dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu. Penelitian di Indonesia yang meneliti secara komprehensif hubungan mekanisme *corporate governance*, pengungkapan sukarela, sepengetahuan penulis belum ditemukan. Oleh karena

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal yaitu :

1. Penelitian mengenai struktur kepemilikan di Indonesia, para peneliti terdahulu (Midiastuty 2003, Veronica 2005, dan Budiwitjaksono 2005) menekankan pada pengujian apakah kepemilikan saham oleh kelompok tertentu dapat menjadi mekanisme *corporate governance*, sedangkan pada penelitian ini menganalisis konsentrasi kepemilikan institusional.
2. Bagaimana peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik pengungkapan informasi di Indonesia masih perlu dilakukan penelitian mengingat hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Regulasi keharusan memiliki komisaris independen di Indonesia masih relatif baru, penting untuk dilakukan penelitian lanjutan. Bagaimana dampak komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris, serta dampaknya terhadap praktik pengungkapan pada laporan keuangan, saat penelitian ini ditulis belum banyak ditemukan kajian penelitian.
3. Penelitian ini menggunakan spesialisasi industri KAP sebagai proksi kualitas audit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan ukuran KAP sebagai proksi dari kualitas audit (Ardiati 2003, Veronica 2005). Penggunaan spesialisasi industri KAP sebagai ukuran kualitas audit diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengukuran kualitas audit yang lebih baik.

4. Pengukuran pengungkapan sukarela. Alasan penulis menitik beratkan pada pengungkapan sukarela adalah berdasarkan hasil penelitian Zaki Baridwan et al 2001 (Utami 2005), yang meneliti praktik pengungkapan wajib (*mandatory*) emiten di Bursa Efek Jakarta. Indeks pengungkapan dari 100 sampel laporan keuangan emiten tahun 2000 rata-rata adalah 96 %, artinya emiten telah memenuhi pengungkapan 96 % dari 721 item yang wajib diungkapkan menurut standar akuntansi dan peraturan Bapepam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktek pengungkapan wajib sudah ditaati oleh emiten.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, ukuran anggota Dewan Komisaris, dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
- 3) Apakah komposisi anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
- 4) Apakah ukuran Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
- 5) Apakah Kompetensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

- 6) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance*, pengaruhnya terhadap manajemen laba dan pengungkapan sukarela.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris;

- 1) Pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, ukuran Dewan komisaris, dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP, terhadap pengungkapan sukarela.
- 2) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.
- 3) Pengaruh komposisi anggota Dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
- 4) Pengaruh ukuran Dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
- 5) Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
- 6) Pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan operasional dan pengembangan ilmu.

1.4.1 Kegunaan Operasional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada :

1. Para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme dan model-model *corporate governance*, praktik pengungkapan dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.
2. Regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bapepam untuk dapat mendukung penyelenggaraan perusahaan yang memadai dan memberikan iklim yang kondusif bagi pelaku pasar modal.

1.4.2. Kegunaan dalam Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan khususnya *agency theory* dan *corporate governance theory*, sehingga dapat memperoleh model mekanisme *corporate governance* yaitu: (a) kepemilikan institusional; (b) jumlah dan komposisi dewan komisaris; dan (d) kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP, yang secara konseptual dapat mempengaruhi praktik pengungkapan dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mungkin juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian lanjutan, terutama dalam hal: (a) rekonseptualisasi pengaruh kepemilikan saham terhadap praktik pengungkapan pada laporan keuangan; (b) rekonseptualisasi pengaruh karakteristik Dewan Komisaris; (b) rekonseptualisasi pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela; (c) rekonseptualisasi pengukuran variabel kualitas audit. Dalam konteks kegiatan penelitian bidang akuntansi dan auditing, hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empirik

terhadap validitas variabel spesialisasi industri KAP sebagai proksi kualitas audit;
dan (d) rekonseptualisasi pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap
pengungkapan sukarela.



Utama
UNIVERSITAS WIDYATAMA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tuntutan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham (selanjutnya disebut prinsipal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (selanjutnya disebut agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Tujuan pemisahan tersebut, agar diperoleh keuntungan yang optimal, karena perusahaan dikelola oleh tenaga profesional.

Pemisahan kepemilikan dengan pengelolaan selain dapat memberikan dampak positif, juga dapat berdampak negatif. Dampak negatifnya, terdapat potensi konflik kepentingan antar pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen) yang akan menimbulkan biaya keagenan. Konflik kepentingan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan prinsipal kepada agen, yaitu agen bertindak tidak sepenuhnya untuk kepentingan prinsipal. Manajemen kecenderungan membuat keputusan-keputusan yang tidak konsisten dengan kepentingan prinsipal dalam rangka memaksimumkan kepentingannya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Model disain kontrak antar dua atau lebih pihak yang bagaimana agar dapat mendorong agen yang rasional bertindak atas kepentingan prinsipal, ketika terdapat konflik kepentingan antar berbagai pihak yang terlibat

kontrak tersebut adalah esensi dari teori keagenan (*Agency Theory*) Scott (2003: 305).

Colgan (2001) mengidentifikasi terdapat empat masalah yang secara potensial bisa menimbulkan konflik keagenan : (1) *Morald-Hazard agency conflicts*, salah satu pihak mengambil keuntungan pribadi dan mementingkan utilitas pribadi; (2) *Earning retention agency conflicts*, manajemen dan atau pemegang saham pengendali cenderung lebih suka menahan laba, sementara pemegang saham (minoritas) lebih suka membagikan laba; (3) *Time Horizon agency conflicts*, pemilik lebih *concern* terhadap kontinuitas dan *future cash flows* perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas, sementara manajer lebih *concern* terhadap *cash flow* dalam periode kepemimpinannya; dan (4) *Managerial risk aversion agency conflicts*, manajemen yang cenderung menghindari risiko.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam hubungan keagenan akan menimbulkan biaya keagenan baik bersifat *financial* maupun *non financial* (*agency cost*) yang dibagi dalam tiga jenis yaitu: *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi tindakan agen. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan agen (baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan) untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan yang tidak diperkenankan oleh prinsipal. Sedangkan *residual cost* adalah biaya yang timbul karena adanya kenyataan bahwa tindakan agen kadangkala berbeda jika pemilik sendiri yang melakukannya, efek ini disebut *residual cost*.

2.1.2. Mekanisme *Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian dan Tujuan *Corporate Governance*

Problem keagenan terjadi ketika timbul konflik antar tujuan pemilik (prinsipal) dengan para direksi/*top management* sebagai agen. Para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh manajemen. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang mampu mensejajarkan kepentingan pemegang saham selaku pemilik dengan kepentingan manajemen. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnisnya (Tjager, 2003).

Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. Target pengendalian yang dimaksud adalah kebijakan dan keputusan manajemen. Maksudnya pengendalian terhadap perusahaan diarahkan pada pengawasan perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan manajer dapat dinilai apakah bermanfaat bagi perusahaan dan pemilik ataukah bagi para manajer sendiri. Pengendalian lebih diarahkan pada upaya pengelolaan perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dan ada proses pengawasan.

La Porta et al. 2000 (*Monetary Authority of Singapore, MAS 2004*), *corporate governance* adalah seperangkat mekanisme untuk memastikan bahwa kepentingan

outside investors terlindungi dari kemungkinan *expropriation* pihak *insider*, yaitu manajer dan pemegang saham pengendali.

1. Monk and Minow (2001) mendefinisikan :

“*Corporate governance* berkaitan dengan proses dan mekanisme aktivitas perusahaan dalam menjalankan wewenang dan pengarahan perusahaan, supervisi pelaksanaan tindakan dan pengarahan perusahaan. Mekanisme yang dimaksud adalah hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka mengarahkan dan menentukan kinerja perusahaan. Pihak utama yang terkait disini adalah: (1) pemegang saham, (2) manajemen dan (3) *Board of directors*”

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang terdiri atas mekanisme *corporate governance* dan proses *corporate governance* aktivitas perusahaan dalam menjalankan wewenang dan pengarahan perusahaan, supervisi pelaksanaan tindakan manajemen dan pertanggungjawaban.

Mekanisme *corporate governance* adalah struktur hubungan pertanggung jawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan, yakni pemegang saham, pengawas (komisaris), dan pengelola (direksi/manajemen). Sedangkan proses *corporate governance* merupakan mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ utama perusahaan tersebut.

2.1.2.2. Pengertian Mekanisme *Corporate Governance*

Sebagai suatu sistem pengendalian, *corporate governance* (CG) dapat terdiri atas mekanisme CG dan proses CG. Mekanisme CG mencerminkan fungsi pengendalian sedangkan proses CG mencerminkan implementasi CG dalam aktivitas usaha. Pemisahan mekanisme CG dari proses CG, mengindikasikan

mekanisme CG perusahaan dapat membantu proses CG perusahaan terlaksana dengan baik.

Majidah (2005) membedakan mekanisme CG dengan proses CG. Mekanisme CG adalah komponen-komponen yang terkait dalam fungsi pengendalian, misalnya; komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Adapun proses CG adalah pelaksanaan dan implementasi CG melalui pelaksanaan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Proses tata kelola perusahaan ini di antaranya dapat meliputi : (a) pemberian suara sesuai dengan jumlah kepemilikan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan; (b) penyajian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, memberikan pengungkapan yang memadai sebagai manifestasi dari prinsip transparansi; dan (c) ketaatan manajemen pada peraturan dan perundang-undangan serta kepeduliannya terhadap lingkungan, sebagai manifestasi dari prinsip akuntabilitas.

Babic (2005) menyatakan bahwa sistem *corporate governance* dapat berbeda tergantung atas bagaimana mekanisme pemilik perusahaan mempengaruhi manajer. Secara umum mekanisme *corporate governance* terdiri atas dua jenis yaitu: (1) *The internal mechanisms of corporate governance*; dan (2) *The external mechanismst of corporate governance*.

Mekanisme internal adalah cara-cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan berbagai elemen yang ada di dalam organisasi misalnya; komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, struktur kepemilikan perusahaan, mekanisme insentif dan *rewarding*. Mekanisme eksternal adalah cara-cara

mengendalikan perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti keterlibatan pihak regulator/pemerintah, dan pengendalian oleh pasar.

Secara komprehensif World Bank (1999) menggambarkan interaksi mekanisme internal dengan eksternal seperti pada Gambar 2.2. Faktor internal terdiri dari mekanisme *governance* yang menggambarkan berbagai elemen didalam korporasi, sementara faktor eksternal dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama pihak swasta (*private*) terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan korporasi serta para agen yang dikenal karena reputasinya (*reputational agent*), dalam kelompok ini termasuk “profesi akuntan”. Kedua adalah perangkat “aturan main” di antaranya “Standar Akuntansi dan *Auditing*”

Faktor eksternal dimaksudkan untuk mendisiplinkan perilaku pihak *insider* agar lebih transparan, akuntabel dalam mengelola korporasi. Format *world Bank* tersebut memberikan gambaran secara jelas tentang peranan dan posisi profesi akuntan di dalam suatu sistem *corporate governance*, terutama jika dikaitkan dengan mekanisme pendisiplinan manajemen atau pihak *insider*.

Mekanisme *corporate governance* pada perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi, untuk beberapa hal dapat berbeda dibandingkan pada perusahaan dengan kepemilikan menyebar. Dalam kepemilikan terkonsentrasi, terdapat potensi manajemen dikendalikan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tindakan oportunistik yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, sehingga mekanisme pengendalian ditujukan untuk mengendalikan manajemen dan pemegang saham pengendali (Coffee, 2005).

Fan dan Claessens (2002) mengemukakan, terdapat beberapa mekanisme *corporate governance* untuk perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan oleh pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas secara kolektif (mereka bersatu) dapat memberikan *pressure* terhadap manajemen dan pemegang saham pengendali.
- (2) Menghadirkan *outside directors* dalam komposisi *board of directors*. *Outside director* diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
- (3) Auditor eksternal. Kehadiran auditor eksternal dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Melalui perannya diharapkan tindakan *expropriation* manajemen dan atau pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham minoritas dapat dicegah.

Di Indonesia mekanisme pengawasan oleh pemegang saham minoritas saat ini nampaknya belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat masih rendahnya tingkat transparansi informasi, dan sulitnya pemegang saham minoritas mengakses informasi secara langsung terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini akan menganalisis dimensi komposisi dewan komisaris dan audit oleh auditor eksternal sebagai mekanisme *corporate governance*.

2.1.3. Kepemilikan Institusional

Distribusi kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan.

Undang-undang Perseroan Terbatas no.1 tahun 1995 menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi di dalam suatu perusahaan. Ia memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak kebijakan korporasi yang bersifat strategis dan penting, serta pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi. Dengan demikian, struktur kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh institusi (non individu) dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham institusi terhadap jumlah saham beredar. Pada penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan jumlah persentase terbesar kepemilikan institusional pada perusahaan.

2.1.4. Karakteristik Dewan Komisaris sebagai Mekanisme *Corporate Governance*

2.1.4.1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian krusial dari struktur korporasi, yang menghubungkan antar pihak pemilik atau pemegang saham dengan pihak manajemen. Aktivitas dewan komisaris terdiri dari peran memberikan pengarahan dan pengawasan. Peran pengarahan dewan komisaris mencakup perumusan strategi dan penetapan kebijakan yang berorientasi ke masa depan. Sedangkan peran pengawasan yaitu mengawasi apa yang telah digariskan. Pada perseroan terbatas, undang-undang dengan jelas mengatakan bahwa dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap direksi dan memberikan nasehat.

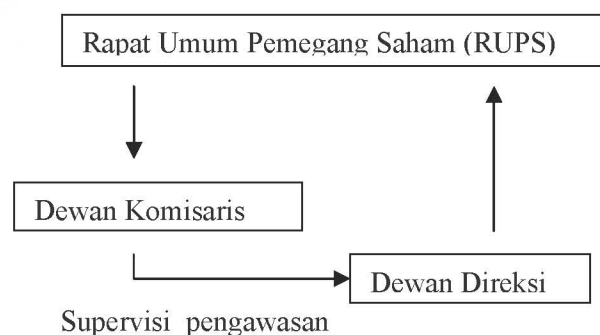
Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2005), Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan korporat, memilih personal manajemen tingkat atas, menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik. Pada intinya, Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai wakil pemegang saham, dewan komisaris berfungsi melakukan mekanisme pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), termasuk pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan, sehingga kepentingan semua pemegang saham terlindungi.

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berasal dari dua sisi hukum yang berbeda, *Anglo Saxon* dan *Continental*. Sistem hukum *Anglo Saxon* mempunyai sistem satu tingkat atau *One Tier system*. Dalam sistem ini, perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi (*Board of Director*) yang pada umumnya merupakan kombinasi antar manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menerapkan *One Tier System* ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem hukum kontinental mempunyai sistem dua tingkat atau *Two Tier System*. Dalam sistem ini, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk mengangkat dan setiap saat mengganti anggota Dewan Direksi, serta bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Pada sistem ini, Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam suatu rapat umum pemegang saham (RUPS). Negara-negara yang menerapkan *Two Tier System* ini misalnya Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang.

Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan berasal dari sistem hukum Belanda, oleh karena itu struktur dewan komisaris di Indonesia menggunakan *Two Tier System*. Struktur dewan komisaris dan dewan direksi yang diadopsi oleh Indonesia adalah :



Gambar 2.3.
Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di Indonesia
Sumber : FCGI (2006)

2.1.4.2. Karakteristik Dewan Komisaris

Dalam pedoman *Good Corporate Governance Ref.4.0* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001), menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen. Independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dalam hubungannya satu sama lain dan terhadap manajemen.

Independensi dewan adalah salah satu karakteristik penting untuk dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya. Sikap independen adalah suatu sikap tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak untuk kepentingan siapapun, karena ia melaksanakan fungsinya secara profesional untuk kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham, serta para *stakeholders* lainnya (SPAP 220.01 alinea 02).

Lebih jauh, peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, dalam hal ini adalah jumlah dan komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan dalam hal ini, semakin besar persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan, akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Di Indonesia komposisi keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan digunakan terminologi komisaris “ekstern” atau “independen”. Dalam

pembahasan selanjutnya, penggunaan istilah *board of director* yang direview dari *tex book* dan jurnal luar negeri, dalam konteks perseroan di Indonesia yang dimaksud adalah dewan komisaris sebagaimana diatur dalam struktur dewan *Two Tier Systems*.

Komisaris independen menurut FCGI (2006: hal 8) adalah komisaris yang ; bukan anggota manajemen perusahaan, bukan pemegang saham mayoritas, bukan anggota manajemen atau komisaris perusahaan lain dalam satu kelompok usaha, bukan penasihat profesional dan bukan pemasok signifikan perusahaan atau perusahaan lain yang satu kelompok usaha, tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lain dalam satu kelompok usaha, dan bebas dari kepentingan dan bisnis dengan perusahaan.

Barnhart & Rosenstein 1998 membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director* (komisaris independen) maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *board of director* dalam menjalankan perannya. Disamping itu, Komisarin independen dapat berfungsi untuk menselaraskan kepentingan para pemegang saham dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas.

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan komisaris independen dapat menentukan efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris, sehingga semakin banyak jumlah anggota komisaris independen semakin meningkatkan independensi dan efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, termasuk dalam hal ini pengawasan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Karakteristik lain Dewan komisaris adalah jumlah keanggotaan Dewan Komisaris dan kompetensi Dewan komisaris. Jumlah anggota Dewan komisaris dan kompetensi Dewan Komisaris mempengaruhi kapabilitas anggota dewan komisarsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga akan lebih meningkatkan efektivitas Dewan komisaris.

2.1.5. Kualitas Audit Sebagai Mekanisme *Corporate Governance*

2.1.5.1. Kualitas Audit oleh Auditor Eksternal

Eksternal auditor atau Akuntan independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Peran eksternal auditor yaitu memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal, dapat dipertanggung jawabkan dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi.

Sebagai *reputational agent*, akuntan melakukan audit atas laporan keuangan , untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan manajemen, oleh karena itu dilihat dari sisi hubungan keagenan maka eksternal auditor merupakan agen dari prinsipal yang bekerja untuk kepentingan prinsipal, bekerja secara objektif dan independen menggunakan keahliannya untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Menurut Arens et al (2008) *auditing* harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Independen artinya bahwa eksternal auditor dalam bekerja harus objektif, tidak boleh memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya. Kompeten artinya bahwa auditor harus mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan *auditing*. Keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

IAI dalam pernyataan Standar *Auditing* (PSA No.4 tahun 1994) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi sebagai profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknik yang cukup.

Dari penjelasan di muka nampak bahwa agar akuntan eksternal berperan optimal maka harus memberikan jasa audit berkualitas. Kualitas audit dapat dipenuhi jika, audit dilakukan oleh auditor kompeten dan independen. Dengan demikian kompetensi dan independensi merupakan dimensi dari kualitas audit.

Chen et al (2005) mengembangkan dua dimensi kualitas audit. Pertama, kualitas audit adalah audit yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian informasi keuangan. Kedua, salah saji yang material pada laporan keuangan harus disajikan pada laporan audit.

2.1.5.2. Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik sebagai Proksi dari Kualitas Audit

Terdapat dua proksi dari kualitas audit yang biasa digunakan dalam penelitian akuntansi keuangan dan *auditing* di Pasar Modal yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (selanjutnya ditulis spesialisasi industri KAP). Penelitian ini menggunakan spesialisasi industri KAP sebagai proksi dari kualitas audit.

Penelitian dengan menggunakan spesialisasi industri KAP (*industry specialist audit firm*) atau spesialisasi industri auditor (*industry specialist audit firm*) sebagai proksi dari kualitas audit di antaranya adalah : Zou et al 2001, Johl 2003, Carcello 2004, Chen 2005. Spesialisasi industri KAP adalah konsentrasi jasa audit KAP pada bidang industri tertentu. Semakin tinggi frekuensi pemberian jasa audit terhadap perusahaan pada bidang industri tertentu, menjadikan KAP tersebut memiliki keahlian (*expert*) dan pengalaman pada bidang industri tersebut. Kombinasi keahlian dan pengalaman KAP dalam kekhususan perusahaan dan industri menghasilkan konsekuensi terhadap kualitas audit. Craswell et al 1995 (Mayhew dan Wilkins 2003) menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor pada bidang industri tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit.

Hogan dan Jeter 1999 (Mayhew dan Wilkins 2003) menyatakan bahwa spesialisasi industri auditor membuat auditor mampu menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non-spesialis. Dengan keahlian dan pengetahuan tentang industri, auditor dapat memberikan jasa audit berkualitas. Pengetahuan tentang industri merupakan salah satu elemen dari keahlian auditor .

Schaurer et al (2000) menyatakan bahwa kualitas audit meliputi kompetensi dan independensi. Salah satu faktor kompetensi auditor adalah pengetahuan industri secara spesifik. KAP spesialis industri lebih banyak memiliki pengetahuan secara spesifik tentang industri dibandingkan dengan KAP non-spesialis, sehingga mereka lebih banyak memiliki keahlian untuk dapat mengidentifikasi kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan dalam kelompok industri tersebut (Dun and Mayhew 2004).

Neal dan Riley (2004) menyatakan bahwa spesialisasi industri auditor dapat diukur dengan pendekatan pangsa pasar (*market share*). Spesialisasi KAP dapat dibedakan dengan kompetitornya dari besarnya penguasaan pangsa pasar dalam industri tertentu. Dalam kelompok industri tertentu, KAP yang memiliki pangsa pasar relatif lebih besar dibandingkan dengan KAP lainnya akan lebih banyak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang industri yang bersangkutan. KAP yang memiliki pangsa pasar lebih besar akan memiliki pengalaman dan keahlian mengaudit sektor industri tersebut. Sehingga, semakin besar pangsa pasar jasa audit dalam kelompok industri tertentu, maka KAP tersebut semakin terspesialisasi.

Neal and Riley (2004) selanjutnya menyatakan bahwa pengukuran pangsa pasar jasa audit dapat menggunakan volume perusahaan klien, atau dalam bentuk proporsi *audit fee* yang diterima KAP dari total *audit fee* dalam kelompok industri tertentu. Apabila pengukuran pangsa pasar menggunakan besar *audit fee* yang diterima, kemungkinan prosedur ini sulit untuk ditempuh karena kesulitan mendapatkan data *audit fee* yang dibayarkan perusahaan klien terhadap KAP.

Oleh karena itu, salah satu prosedur yang dapat ditempuh yaitu dengan menggunakan proksi nilai total volume klien perusahaan pada kelompok industri tertentu sebagai proksi dari *audit fee*.

Craswell 1995 (Chen et al 2005) menyatakan bahwa pangsa pasar *audit fee* pada industri tertentu merupakan ukuran spesialisasi industri KAP. Namun, dikarenakan data *audit fee* tidak tersedia, sehingga prosedur ini sulit untuk ditempuh, maka prosedur alternatif digunakan sebagai proksi dari *audit fee*, yaitu total volume perusahaan klien pada kelompok industri tertentu atau total penjualan/*asset* perusahaan klien.

Dalam penelitian ini, pengukuran spesialisasi industri KAP akan digunakan variabel *dummy* volume perusahaan klien KAP pada kelompok industri tertentu. Pengukuran dengan nilai *dummy* atau dikotomi, Palmrose dalam Neal and Riley (2003) menyatakan bahwa KAP dapat terspesialisasi jika memiliki pangsa pasar setidaknya 20 % lebih besar dari KAP lainnya. Pada penelitian ini *cut-off* jumlah minimal pangsa pasar dari spesialisasi industri KAP ditetapkan sebesar 15 %. Jumlah tersebut ditentukan sesuai dengan *cut off* yang dilakukan oleh Chen et al (2005). Angka 15 % ditentukan atas dasar pertimbangan karakteristik pasar modal yang mana jumlah emiten di BEJ masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar modal di negara maju, sementara jumlah KAP relatif banyak.

2.1.6. Pengungkapan Sukarela

2.1.6.1. Teori dan Praktik Pengungkapan Sukarela

Pelaporan keuangan (*Financial reporting*) lebih luas dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan berbagai informasi tambahannya. *Financial reporting* meliputi laporan keuangan itu sendiri ditambah

berbagai suplemennya dalam berbagai bentuk agar dapat memberikan gambaran keuangan dan operasi perusahaan secara memadai untuk kepentingan pemakai laporan keuangan.

Dalam SFAC No.5 dijelaskan bahwa *financial reporting* mencakup: (1) *Basic financial statement*; (2) *supplementary information*; dan (3) *Other means of financial reporting*. *Basic Financial Statement* meliputi: (1) *Statement of financial position*; (2) *Statement of earnings and comprehensive income*; (3) *Statement of cash flow*; (4) *statement of invesment by and distributions to owners*; dan (5) *Notes to Financial Statement*. *Basic financial statement* inilah yang harus taat pada standar akuntansi dan merupakan laporan yang diaudit.

Informasi yang didapat dari laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan pada laporan keuangan. Tearney (2001:302) menyatakan bahwa *disclosure as presentation of informarmation*. Secara luas pengungkapan merupakan penyajian informasi melalui laporan keuangan dan suplemennya yang dapat berupa: catatan atas laporan keuangan, pernyataan kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis dan diskusi manajemen tentang operasi perusahaan untuk masa yang akan datang, *forecasts* finansial dan operasi, pengungkapan berdasarkan segmen.

Berapa banyak informasi tersebut harus diungkapkan, terdapat tiga konsep yang umumnya digunakan yaitu: (1) *Adequate disclosure* merupakan pengungkapan minimum yang disajikan perusahaan untuk menyampaikan sejumlah minimum informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku agar informasi tersebut tidak menyesatkan; (2) *Fair disclosure* adalah

pengungkapan yang menyajikan pengungkapan minimum yang dipersyaratkan dan pengungkapan tambahan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar dan adil; dan (3) *Full disclosure* adalah pengungkapan semua informasi yang *relevance*, Hendriksen (1989).

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no.1, par.7) terdiri dari komponen-komponen: (a) neraca; (b) laporan laba-rugi; (c) laporan perubahan ekuitas; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK no.1 par.10)

Selain catatan atas laporan keuangan, perusahaan juga dianjurkan untuk memberikan informasi tambahan. Informasi tambahan yang dianjurkan meliputi: (1) telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan; (2) posisi keuangan perusahaan; (3) kondisi ketidakpastian; (4) laporan mengenai lingkungan hidup; dan (5) laporan nilai tambah (PSAK no.1 par.8,9).

Dari sumber PSAK tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Catatan atas laporan keuangan adalah merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh standar akuntansi.
2. Informasi lain (informasi tambahan) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

Dengan demikian, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang diharuskan menurut ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam; (2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.

Dalam SFAC No.5 dijelaskan bahwa *financial reporting* mencakup: (1) *Basic financial statement*; (2) *Supplementary information*; dan (3) *Other means of financial reporting* (*Accounting standards* 1983:191). Dari sumber SFAC dapat disimpulkan bahwa *Notes to financial statement* adalah pengungkapan yang diharuskan oleh standar akuntansi, *Supplementary information* dan *other means of financial reporting* ada yang diharuskan oleh peraturan (*regulatory rule*). Diluar yang diharuskan oleh peraturan adalah merupakan pengungkapan sukarela manajemen.

Pengungkapan sukarela menurut Choi (1999) “*Where disclosure are not enforced, the required disclosure are (in practice) voluntary, since corporate managers will not comply with disclosure rules if compliance is more costly than expected cost of non compliance*”. Dari penjelasan Choi (1999) tersebut dapat

disimpulkan bahwa praktik pengungkapan yang tidak diharuskan oleh standar akuntansi dan regulasi adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Praktik pengungkapan sukarela dari studi komparatif beberapa negara dapat meliputi (Choi 1994,1999) :

1. *Disclosure of forward-looking information*, hal ini mencakup :
 - a. *Forecasts of revenue, income, eps, capital, expenditure and other financial item*
 - b. *Prospective information about future economic performance or position that is less definite than forecast in terms in projected item, fiscal periode, and projected amount.*
 - c. *Statement of management's plans and objective for future operations*
2. *Social responsibility disclosure*
3. *Special disclosure for non domestic financial statement users*
4. *Employee disclosure*
5. *Value added disclosure*
6. *Enviromental concern*

2.1.7.2. Kualitas Pengungkapan Sukarela

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkenaan dengan pengukuran pengungkapan sukarela, periksa tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pengukuran Pengungkapan Sukarela

Botosan (1997)	Chau and Gray (2002)	Utami (2005)	Suripto (2001)	<i>Annual report award</i> , Bapepam (2005)
(1) <i>background information</i> , (2) <i>ten or five year summary of historical result</i> , (3) <i>key –non financial statistics</i> , (4) <i>projected information</i> , (5) <i>management discussion and analysis</i>	(1) <i>general corporate information</i> , (2) <i>corporate strategy</i> (3) <i>acquisition and disposals</i> , (4) <i>Research and development</i> , (5) <i>future prospects</i> , (6) <i>information about directors</i> , (7) <i>employee information</i> , (8) <i>social policy and value added information</i> , (9) <i>segmental information</i> , (10) <i>financial review</i> , (11) <i>foreign currency information</i> , (12) <i>stock price information</i> .	(1) profil perusahaan, (2) Informasi komisaris dan direksi perusahaan, (3) strategi dan kinerja perusahaan, (4) prospek Bisnis, (5) informasi pegawai, (6) tanggung jawab sosial, (7) produk, (8) informasi tata kelola perusahaan	(1) informasi tentang strategi dan tujuan perusahaan, (2) informasi proyeksi kinerja perusahaan tahun berikutnya, (3) informasi produk dan pemasaran, (4) tanggung jawab sosial, (5) informasi pegawai, (6) ringkasan statistik keuangan, (7) informasi nilai tambah	(1) umum, (2) ikhtisar data keuangan penting, (3) laporan dewan komisaris dan direksi, (4) profil, (5) analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, (6) <i>good corporate governance</i> . (7) informasi keuangan (<i>mandatory disclosure</i>).

PSAK dan SFAC tidak mendefinisikan kualitas pengungkapan secara eksplisit. Namun secara implisit menyebutkan bahwa kualitas pengungkapan terkait dengan relevansi informasi yang diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar. Kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dikenal dengan berbagai konsep antara lain kecukupan (*adequity*), kelengkapan (*completeness*), informatif (*informativeness*) dan tepat waktu (*time lines*) (Marwata, 2001).

Imhoff (1992) menunjuk pada tingkat kelengkapan (*completeness*) sebagai karakteristik kualitas pengungkapan. Indikator empirisnya berupa indeks pengungkapan (*disclosure index*) yang merupakan rasio antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang mungkin dipenuhi. Makin tinggi indeks pengungkapan, makin tinggi kualitas pengungkapan.

Saudagaran dan Diga (1997) meneliti karakteristik dan isu-isu kebijakan pelaporan keuangan di berbagai negara. Pengungkapan diukur dengan *availability*, *reliability*, *comparability*. *Availability* menyangkut kualitas pengungkapan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan investasi. Salah satu aspek kualitas pengungkapan ini adalah kelengkapan pengungkapan.

Penelitian ini dibatasi pada upaya untuk melihat tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela perusahaan publik sektor manufaktur di Indonesia, sebagai salah satu dimensi kualitas pengungkapan. Peneliti ini tidak mengukur kejelasan/kerincian pengungkapan, serta ketepatan waktu pengungkapan.

Instrumen pengukuran pengungkapan sukarela dalam penelitian ini dirancang dengan mengacu pada peraturan Bapepam Nomor.VIII G.2 /1996, tentang penyampaian laporan tahunan yang akan dimodifikasi dengan instrumen dari: (1) penilaian laporan tahunan perusahaan publik (*annual report award*) dari Bapepam (2005); (2) Khomsiyah dan Utami (2005); (3) Botosan (1997); (4) Chau and Gray (2002); serta (5) Suripto dan Baridwan (1999). Instrumen dari Bapepam (*annual report award instrument*) dijadikan acuan dengan pertimbangan instrumen tersebut dipandang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia, sementara referensi lainnya dijadikan acuan karena instrumen tersebut secara empiris telah teruji.

Dalam penelitian ini kelengkapan pengungkapan diukur dengan item pengungkapan tanpa memberikan pembobotan. Pemakaian pendekatan tersebut didasarkan pada dua alasan : (1) laporan tahunan didasarkan untuk tujuan umum, sehingga terdapat kemungkinan suatu item informasi penting untuk pihak tertentu tetapi tidak penting untuk pihak lain; dan (2) untuk menghindari subyektivitas

pemberian bobot kepada masing-masing item pertanyaan pada instrumen pengungkapan. Menurut Chow dan Wong-Baren 1987 (Marwata 2001) menggunakan skor pengungkapan dengan pembobotan maupun tanpa pembobotan ternyata hasilnya identik.

2.1.7. Hasil Penelitian Empiris Sebelumnya tentang Pengaruh Kepemilikan institusional, Karakteristik Dewan Komisaris, Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela

2.1.7.1 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela

Chau dan Gray (2002) melakukan penelitian untuk menguji hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan sukarela. Data yang digunakan adalah data pasar modal di Hong Kong dan Singapura. Pada kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat mengakses langsung kebutuhan informasi tanpa melalui pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan lemahnya tuntutan atas *corporate disclosure*, karena kurangnya tuntutan publik atas pengungkapan. Hasil penelitiannya berhasil membuktikan hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan negatif antar konsentrasi kepemilikan saham dengan luas pengungkapan.

Hannifa and Cooke (2002), meneliti hubungan kultur, *corporate governance*, dan karakteristik perusahaan dengan pengungkapan, menggunakan data pasar modal di Malaysia. Salah satu hipotesis yang diuji adalah hubungan konsentrasi kepemilikan (diukur dengan kepemilikan saham oleh 10 terbesar) dengan luas pengungkapan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan

oleh 10 pemegang saham terbesar berhubungan positif dengan pengungkapan. Artinya, semakin terkonsentrasi kepemilikan semakin luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian Haniffa mendukung *alignment effect hypothesis* yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali, akan berdampak pada terjadinya keselarasan kepentingan.

Eng dan Mak (2003) meneliti hubungan kepemilikan institusional (*government ownership*) dengan pengungkapan sukarela. Mereka berpendapat ketika kepemilikan institusional tinggi akan memiliki kekuatan untuk mendorong manajemen memberikan pengungkapan yang lebih luas. Hipotesis yang diajukannya pengungkapan sukarela meningkat ketika kepemilikan institusional meningkat. Eng dan Mak juga berpendapat bahwa kepemilikan oleh pemerintah umumnya long term investment, sehingga mereka memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan shortterm investment. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan sukarela.

Lakhal (2004) dengan menggunakan sampel 207 perusahaan publik di Perancis pada periode pengamatan dari Tahun 1998 sampai dengan 2001, meneliti hubungan pengungkapan sukarela atas laba dengan *corporate governance*. Salah satu tujuan penelitiannya ingin mengetahui hubungan kepemilikan institusional asing dengan pengungkapan sukarela atas laba. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antar pengungkapan sukarela atas laba dengan kepemilikan institusional asing.

Mohd (2005) meneliti hubungan pengungkapan sukarela dengan praktik *corporate governance*, menggunakan data pasar modal di Malaysia. Salah satu hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan positif antar kepemilikan mayoritas dengan luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitiannya menunjukkan kepemilikan mayoritas mempunyai hubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela.

2.1.9.2. Komposisi Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sukarela

Willekens, M. et al (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan data perusahaan publik di Belgia. Salah satu hipotesisnya, *board independence* dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela. Instrumen pengungkapan sukarela didisain berdasarkan konsep *Balance scorecard*. Mereka berargumentasi bahwa semakin besar proporsi *independence directors* akan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh *board of director*, sehingga dapat mendorong perusahaan agar lebih transparan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *board independence* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

Leung *et al* (2004) melakukan penelitian dengan menggunakan data sampel perusahaan publik di Hong Kong dan Thailand. Salah satu hipotesis yang ingin diujinya adalah hubungan proporsi *outside director* dan *board size* dengan tingkat pengungkapan dan transparansi (pengungkapan sukarela). Argumentasi yang dikemukakan, dalam menjalankan fungsi monitoring *outside director* lebih independen terhadap manajemen, karena *outside director* terbebas dari kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya atas perusahaan. *Outside director*

diduga lebih efektif untuk mendorong transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan untuk sampel perusahaan di Thailand terdapat hubungan positif secara signifikan antar proporsi *independent director* dengan tingkat pengungkapan.

Cheng dan Stephen (2004) melakukan penelitian dengan judul *Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure*. Mereka berargumentasi bahwa *independence outside director* mempunyai kemampuan pengawasan yang lebih besar terhadap manajemen, sehingga eksistensinya mencerminkan independensi dewan yang sesungguhnya, akan berbeda dengan anggota *board directors* dari pihak *insider* yang cenderung lebih berafiliasi terhadap manajemen. Hasil pengujiannya membuktikan semakin tinggi proporsi *independent non executive directors* semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan, konsisten dengan hipotesis penelitian.

Susilowati et al (2005) meneliti dengan menggunakan data perusahaan publik di Indonesia dan Australia. Penelitian ini berupa studi komparatif, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan di kedua Negara. Salah satu faktor diteliti adalah proporsi *independent directors*. Argumentasinya, *independence director* merepresentasikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, terutama pemegang saham minoritas. *Independent director* akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen atas pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan, terdapat hubungan positif antar proporsi *independent*

directors dengan tingkat pengungkapan *mandatory* dan pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan.

2.1.9.3. Ukuran Dewan Komisari dan Pengungkapan Sukarela

John dan Senbet (1998) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapabilitas monitoring Dewan komisaris meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah anggota Dewan Komisaris. Hasilnya menunjukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sukarela.

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Yermack (1996) yang mengatakan bahwa, anggota Dewan Komisaris yang berjumlah besar akan menyulitkan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengendalian yang dijalankan Dewan.

2.1.9.4. Kompetensi Dewan Komisari dan Pengungkapan Sukarela

Sarkar (2006) menyimpulkan bahwa komisaris independen yang kompeten pada bidang akuntansi dan atau keuangan terbukti dapat membatasi manajemen laba. Dari hasil ini menunjukan kompetensi Dewan Komisaris dapat menjadi model corporate governance untuk pengendalian manajemen, termasuk pengendalian terhadap praktik pengungkapan pelaporan keuangan. Dengan kompetensi yang dimilikinya Dewan komisaris dapat mendorong dan mengarahkan manajemen untuk menerapkan praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan,

2.1.9.5. Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik dan Pengungkapan Sukarela

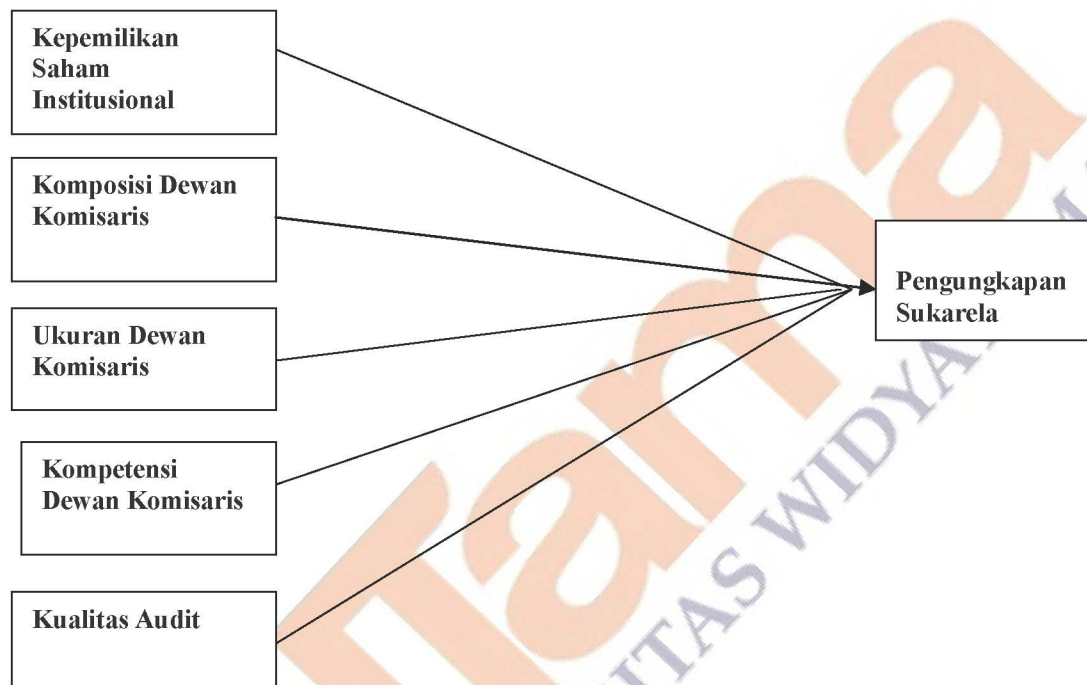
Dunn and Mayhew (2004) melakukan penelitian dengan judul *audit firm industry specialization and client disclosure quality*, dengan menggunakan data perusahaan publik di USA. Tujuan penelitiannya, menguji hubungan *industry specialist audit Firm* dengan kualitas pengungkapan. Argumentasi yang dikemukannya, KAP spesialis dapat dimanfaatkan secara *cost efektifive* oleh perusahaan klien untuk membantu dalam pengembangan praktik pengungkapan pada laporan keuangan. Penggunaan KAP spesialis sebagai isyarat terhadap investor bahwa perusahaan bermaksud untuk memberikan pengungkapan yang berkualitas tinggi. Hasil penelitiannya membuktikan terdapat hubungan positif antar *industry specialist audit firm* dengan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan.

Schauer (2005) meneliti pengaruh spesialisasi industri terhadap kualitas audit, dengan menggunakan data di USA. Tujuan penelitiannya ingin menguji hubungan *bid-ask spreads* sebagai proksi dari kualitas audit dengan spesialisasi industri auditor. Ia berpendapat bahwa semakin tinggi kualitas audit maka probabilitas akurasi laporan keuangan juga semakin tinggi, yang terepleksi pada posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (laba rugi) yang telah diaudit. Informasi keuangan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi antara pelaku pasar, dan berkurangnya asimetri informasi akan menghasilkan *bid-ask spread* yang rendah. Oleh karena itu, *bid-ask spread* merupakan ukuran langsung dari asimetri infomasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang

diaudit oleh auditor spesialis memiliki tingkat asimetri informasi lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor *non-spesialis*.

Peters et al (2005) meneliti hubungan pengungkapan sukarela dengan spesialisasi industri auditor, studi kasus atas *commodity derivative disclosure* di Georgia. Mereka menyatakan bahwa perusahaan menggunakan auditor spesialis untuk mempertahankan kredibilitas laporan keuangan dengan kebijakan pengungkapan yang terbatas, dalam hal ini auditor berkualitas digunakan sebagai pengganti atas pengungkapan terbatas. Perusahaan menggunakan auditor berkualitas untuk menghindari *cost of non-disclosure* yang akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Argumen ini sejalan dengan teori bahwa dalam situasi persaingan, publikasi *private information* akan dimanfaatkan oleh pesaing, sehingga akan mengganggu daya saing produk perusahaan. Hasilnya menunjukkan, perusahaan dengan menggunakan spesialisasi auditor pengungkapannya lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan dengan auditor non-spesialis, dan hipotesisnya terbukti.

Penelitian Peters et al (2005) menggunakan instrumen pengungkapan sukarela yang spesifik mengenai *commodity derivative disclosure*. Berbeda dengan instrumen pengungkapan sukarela yang umum digunakan. Instrumen pengungkapan ini merinci berbagai hal yang berkaitan dengan produk dan derivatifnya, di antaranya pengungkapan atas: pengelompokan produk derivatif; pengaruh fluktuasi harga produk derivatif; laba atau rugi derivatif; dan nilai produk derivatif. Dengan demikian kesimpulan penelitian ini tidak cocok apabila digunakan untuk pengungkapan sukarela secara umum.



Gambar 2.5.
Paradigma Penelitian

Gambar hubungan variable di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
(Eng and Mark: 2003, Sam Han: 2005, Lakhali :2004, Mohd :2005).
- 2) Komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
(Willekens et al: 2003, Leung: 2005, Cheng and Courtney: 2004, Susilowati et al : 2005)
- 3) Ukuran Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
(John dan Senbet 1998; Yermack 1996)
- 4) Kompetensi Dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

- 5) Kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (Dunn and Mayhew: 2004, Schauer: 2004, Peters et al: 2005)

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan dugaan, suatu proposisi sementara, mengenai hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono 1999). Sesuai dengan rumusan masalah dan premis yang telah diuraikan , maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Kesatu : kepemilikan institusional, komposisi Dewan komisaris, ukuran Dewan komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP, berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan sukarela.

Kedua : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

Ketiga : Komposisi anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Keempat : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Kelima : Kompetensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

Kelima : Kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

BAB III

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah variabel yang diamati yaitu; kepemilikan institusional, mekanisme *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris, ukuran Dewan komisaris, dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP, manajemen laba, serta pengungkapan sukarela. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan emiten Tahun 2008. Pertimbangan penggunaan periode ini, karena ketersediaan data di Bursa Efek Indonesia (BEI) dahulu Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Disain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang merupakan penelitian penjelasan atau *explanatory research*. *Explanatory research* merupakan penelitian untuk menjelaskan fenomena yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian. Penelitian *explanatory* berusaha untuk menjelaskan alasan mengapa fenomena tersebut terjadi. Dengan menggunakan teori dan hipotesis, penelitian ini berusaha menjelaskan kekuatan pengaruh dari faktor-faktor yang diamati terhadap fenomena tersebut, Cooper and Schindler (2003). Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan data beberapa subjek pada waktu tertentu (*cross sectional*) dengan keterlibatan peneliti dalam mengendalikan variable penelitian yang minimal (disain *ex-post facto*).

3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel penelitian

Penelitian ini menganalisis variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari konsentrasi kepemilikan, komposisi dewan komisaris, kualitas audit dengan menggunakan proksi spesialisasi industri KAP. Variabel dependen terdiri dari manajemen laba dan pengungkapan sukarela. Definisi dan operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kepemilikan Saham Institusional.

Kepemilikan saham institusional (KS) adalah jumlah kepemilikan oleh investor institusional. Pada penelitian ini kepemilikan saham institusional yang dianalisis adalah kepemilikan institusional terbesar.

2) Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris (KDK) adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Proporsi anggota komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris merepleksikan independensi dan efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan.

3) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota Dewan Komisaris (UDK).

4) Kompetensi Dewan Komisaris

Kompetensi Dewan komisarsi adalah Dewan komisaris yang memiliki minimal satu anggota komisaris yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman pada bidang akuntansi dan atau keuangan.

4) Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri KAP

Kualitas audit adalah audit yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian informasi keuangan Chen et al (2005). Audit yang berkualitas dapat diperoleh jika auditor eksternal tersebut kompeten dan independen Arens et al (2006). Proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah spesialisasi industri KAP (AUDIT) yang menggambarkan keahlian dan pengalaman KAP dalam memberikan jasa audit pada bidang industri tertentu dan merupakan dimensi dari kualitas audit (Craswell et al 2005).

Spesialisasi industri KAP diukur dengan pangsa pasar jasa audit KAP pada bidang industri tertentu, dengan menggunakan volume perusahaan klien pada kelompok industri tertentu (Neal and Riley, 2004).

6) Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela (PS) adalah pengungkapan pada pelaporan keuangan yang tidak diharuskan oleh standar akuntansi keuangan Indonesia dan oleh Bapepam, yang hanya bersifat anjuran serta praktiknya diserahkan sepenuhnya pada emiten, dalam hal ini pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh : (1) Surat edaran No.02/PM/2002, (2) Peraturan No. VIII.G.2 Laporan tahunan, (3) PSAK.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut adalah operasionalisasi variabel penelitian :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala	Acuan
Independen :			
Kepemilikan institusional (KI)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan saham terbesar oleh 	Rasio	Liu and Lu (2002), Febrianto (2003)

Komposisi Dewan Komisaris (KDK)	<p>institusional dari total saham beredar</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah anggota komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris 	Rasio	Barnhart and Rosentein (1998), Budiwitjaksono (2005)
Kompetensi Dewan Komisaris	Dummy variabel: 1 jika memiliki minimal 1 anggota komisaris berlatar belakang pendidikan dan atau pengalaman pada bidang akuntansi dan atau keuangan	Nominal	
Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri KAP (AUDIT)	Perusahaan dengan KAP yang memiliki minimal 15 % volume perusahaan klien dari jumlah total perusahaan pada kelompok industri tertentu.	Nominal	Craswell (1995), Mayangsari (2002), Chen (2005)

Variabel	Indikator	Skala	Acuan
Dependen:	.		
Pengungkapan Sukarela (PS)	<ol style="list-style-type: none"> Sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan. Deskripsi strategi perusahaan Ikhtisar kinerja keuangan Deskripsi kualitas produk dan jaringan pemasaran Informasi latar belakang 	Indeks (Rasio)	pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh : (1) Surat edaran No.02/PM/2002, (2) Peraturan No. VIII.G.2 Laporan tahunan, (3) PSAK.

	komisaris dan direksi perusahaan 6. Analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan 7. Informasi tentang proyeksi dan bisnis perusahaan 8. Informasi karyawan 9. Kebijakan dan tanggung jawab sosial 10. Informasi tentang tata kelola perusahaan		
--	--	--	--

3.3. Populasi dan Cara Penentuan Sampel Penelitian

Populasi sasaran adalah perusahaan industri sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan 2008. Pertimbangan untuk memilih populasi sasaran perusahaan manufaktur adalah berdasarkan studi empirik sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela dan manajemen laba mempunyai variasi yang berbeda untuk setiap jenis industri.

Berdasarkan surat edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002, tanggal 27 Desember 2002, tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten menerangkan bahwa perusahaan publik yang termasuk katagori sektor manufaktur adalah :

1. Industri Dasar dan Kimia
 - a. Industri semen
 - b. Industri keramik
 - c. Industri porselin
 - d. Industri logam dan sejenisnya
 - e. Industri kimia
 - f. Industri plastik dan kemasan
 - g. Industri pakan ternak

- h. Industri kayu dan pengolahannya
- i. Industri pulp dan kertas
- 2. Aneka Industri
 - a. Industri mesin dan alat berat
 - b. Industri otomotif dan komponennya
 - c. Industri perakitan
 - d. Industri tekstil dan garmen
 - e. Industri sepatu dan alas kaki
 - f. Industri kabel
 - g. Industri barang elektronik
- 3. Industri Barang Konsumsi
 - a. Industri makanan dan minuman
 - b. Industri rokok
 - c. Industri farmasi
 - d. Industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga
 - e. Industri peralatan rumah tangga.

Populasi sasaran adalah perusahaan publik sektor manufaktur yang aktif selama tahun 2005, yaitu sebanyak 137 perusahaan (www.Bapepam.com). Bila menggunakan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel ideal untuk populasi target tersebut yaitu 98 perusahaan (Sugiyono, 1999).

Dari Populasi sasaran tersebut sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang memenuhi empat kriteria berikut :

1. Emiten mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember
2. Emiten mempunyai nilai ekuitas positif untuk Tahun 2008. Emiten dengan nilai ekuitas negatif tidak dipilih sebagai sampel karena dengan ekuitas negatif berarti total hutang lebih besar dari *total asset*. Artinya emiten dalam keadaan *insolvent* (tidak mampu membayar hutang-hutangnya) atau mengalami kesulitan keuangan yang serius. Jika emiten dimasukkan sebagai sampel maka kondisi sampel tidak homogen.
3. Tersedia Laporan keuangan tahunan emiten 2008 di BEI.

4. Terdapat minimal 30 perusahaan dalam setiap kelompok industri manufaktur.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Perhitungan Data Variabel Penelitian

Seluruh data penelitian diperoleh dari data sekunder laporan tahunan dan laporan keuangan emiten yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut adalah teknik pengumpulan serta perhitungan data variabel penelitian :

1) Kepemilikan Institusional

Variabel ini diperoleh dari laporan tahunan, pada bagian *shareholders ownership*. Konsentrasi kepemilikan (KS) pada penelitian ini adalah variabel *continue* , yang diukur dari proporsi terbesar pemegang saham perusahaan (Liu and Lu 2002, Febrianto 2003)

2) Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dewan komisaris (KDK) diukur sebagai Variabel *continue*, yaitu persentase keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan yang disebut dengan komisaris independen dari total jumlah anggota komisaris. Data untuk variabel ini bersumber dari laporan tahunan, pada bagian *board of directors*.

3) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota Dewan Komisaris (UDK).

4) Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik

Spesialisasi industri KAP (AUDIT) pada penelitian ini diukur dengan jumlah penguasaan volume perusahaan klien oleh KAP pada bidang industri tertentu.

Jumlah perusahaan pada kelompok industri tertentu ditetapkan minimal sebanyak 30 perusahaan. Jumlah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan jumlah perusahaan publik yang *listing* di BEI secara komparatif lebih kecil dibandingkan dengan Bursa Efek di Negara maju misalnya Amerika Serikat. Penentuan jumlah minimal perusahaan dalam kelompok industri tertentu dapat diubah sesuai kondisi (Chen et al 2005).

Spesialisasi industri KAP diukur sebagai variabel *dummy*), yaitu spesialisasi industri KAP adalah jika KAP_i memiliki volume perusahaan klien minimal 15 % dari jumlah perusahaan klien pada kelompok industri tertentu (Craswell, 1995; Mayangsari,2002; dan Chen, 2005). Pengukuran variabel ini, beri nilai 1 jika perusahaan dengan spesialisasi industri KAP, dan 0 jika lainnya. Variabel spesialisasi industri KAP diperoleh dari laporan tahunan pada bagian auditor eksternal.

5) Pengungkapan Sukarela

Pengukuran pengungkapan sukarela (PS) dilakukan berdasarkan pada aspek kelengkapan pengungkapan sukarela yang terdapat pada laporan tahunan emiten, yang terdiri atas 80 item pengungkapan. Instrumen pengungkapan sukarela dirancang berdasarkan pada : (a) Bapepam (2006); (b) Chau and Gray (2002); (c) Utami (2005); (d) Suripto (1999); dan (e) Botosan (1997), dengan mengacu pada SK. Bapepam No.Kep-06 /PM/ 2000. Instrumen pengungkapan sukarela disajikan pada Lampiran 3.

Perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan sukarela (IKPS) dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomis. Jika suatu item diungkapkan diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan mendapat nilai 0. Dalam pemberian skor ini, item-item yang ada tidak diberi bobot. Hal ini karena, penelitian ini memandang dari sisi pandang bersifat umum, peneliti tidak memandang suatu jenis informasi lebih penting dibandingkan informasi lainnya.
2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan sukarela (IKPS) setiap perusahaan dengan cara membagi skor total yang diperoleh dengan skor total yang diharapkan. Indeks kelengkapan pengungkapan sukarela dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IKPS = \frac{\sum Q}{\sum S} \times 100 \%$$

Keterangan :

IKPS = Indeks kelengkapan pengungkapan sukarela

Q = Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan dalam laporan tahunan

S= Semua item kelengkapan pengungkapan sukarela yang diharapkan, terdapat pada instrumen.

Data pengungkapan sukarela dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.5. Metode Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Model analisis yang dipergunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap manajemen laba dan pengungkapan sukarela, digunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression analysis*). Alasan penggunaan

alat analisis ini karena disesuaikan dengan skala pengukuran variabel penelitian. Variabel terikat, manajemen laba dan pengungkapan sukarela berskala rasio, sedangkan dalam variabel bebas terdapat variabel berskala rasio dan berskala nominal (*dummy variable*).

3.5.3 Rancangan Model Analisis

Rancangan model analisis untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan, mekanisme *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP, terhadap pengungkapan sukarela; hipotesis 6 sampai dengan 10 adalah :

$$PS_i = a_2 + d_1 KI_i + d_2 KDK_i + d_3 UDK_i + d_4 KPDK_i + d_5 AUDIT_i + \varepsilon_{2,i}$$

Di mana :

- PS = Indeks pengungkapan sukarela
- a_2 = Konstanta
- $d_{1,2,3,4}$ = Koefisien variabel ke 1 sampai dengan 4
- KI = Persentase kepemilikan saham terbesar dari total saham beredar
- KDK = Proporsi komisaris independen dari total anggota dewan komisaris
- UDK = Ukuran Dewan Komisaris
- KDK = Kompetensi Dewan Komisaris.
- AUDIT = *Dummy variabel*, 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis, yaitu KAPi yang memiliki pangsa pasar minimal 15% klien perusahaan dari jumlah klien pada kelompok industri tertentu, dan 0 jika lainnya.
- ε_2 = *residual of error*
- i = perusahaan ke i

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris, Kualitas audit, dan Pengungkapan Sukarela

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan Sampel

Populasi sasaran penelitian ini adalah emiten industri sektor manufaktur yang aktif di perdagangan saham BEI tahun 2008. Jumlah populasi emiten industri manufaktur yang aktif di BEI sebanyak 137 perusahaan (www.bapepem.com). Seperti disajikan pada Lampiran 4, sampel penelitian ini berjumlah 80 perusahaan atau 58,7 % dari populasi. Jumlah ini ditentukan sesuai dengan laporan keuangan dan data lain yang berhasil diperoleh penulis, serta memenuhi kriteria sampel seperti yang ditetapkan pada bab III.

Industri sektor manufaktur terdiri atas tiga kelompok: (1) industri dasar dan kimia, (2) aneka industri, dan (3) industri barang konsumsi yang teringkas pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1.
Presentase Perusahaan Sampel Menurut Jenis Industri

No.	Kelompok & Sub Industri Manufaktur	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel	Persentase Sampel
1.	Kel. Industri Dasar dan Kimia	53	26	49
2.	Kel. Aneka Industri	45	23	51
3.	Kel. Barang Konsumsi	39	31	79
	Jumlah	137	80	58

Berikut dibawah ini Tabel yang menunjukkan statistik deskriptif kepemilikan saham oleh manajemen, kepemilikan institusional, spesialisasi industry KAP, ukuran perusahaan, dan Manajemen laba.

Tabel 4.2.

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	80	3.00	98.00	50.5625	23.83904
KDK	80	.00	100.00	38.2663	16.67574
UDK	80	2.00	10.00	4.1250	1.86490
KPDK	80	.00	1.00	.7000	.46115
LOGPNJ	80	4.30	8.85	6.0783	.75362
ML	80	.00	2.05	.1394	.33330
PS	80	20.00	98.75	75.1750	18.48819
Valid N (listwise)	80				

Ket : KI=Kepemilikan instirusional; KDK=Komposisi Dewan Komisaris; UDK=Ukuran Dewan Komisaris; KPDK=Kompetensi Dewan Komisaris; LogPNJ=Ukuran perusahaan;ML=Manajemen laba; PS=Pengungkapan sukarela.

4.1.2. Kepemilikan Saham Institusional Perusahaan Manufaktur

Kepemilikan institusional (KI) adalah salah satu variabel penelitian ini. Pengukuran variabel ini menggunakan proksi persentase kepemilikan saham institusional mayoritas. Data persentase kepemilikan mayoritas pada perusahaan sampel, dapat dilihat pada Tabel 4.3. Statistik deskriptif dari kepemilikan institusional disajikan berikut ini :

Tabel 4.3
Kepemilikan Saham Institusional Perusahaan Manufaktur

Keterangan	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mean (%)	Std. Dev. (%)	Jumlah Emiten di atas Rata-Rata	Jumlah Emiten di Bawah Rata-Rata
Konsentrasi kepemilikan	3.00	98	50.5	23.8	51	49

Sumber : Lampiran 6 diolah.

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa kepemilikan saham institusional di industri manufaktur relatif tinggi. Rata-rata konsentrasi kepemilikan saham sebesar 50,5 %, dengan jumlah emiten di atas rata-rata sebanyak 51 perusahaan atau 50,50% dan emiten di bawah rata-rata sebanyak 49 perusahaan atau 48,50%. U-Thai

(2004) melaporkan tingkat konsentrasi kepemilikan di Australia 30 %, Prancis dan Inggris 20 %, Jepang hanya 10%, dan Amerika dibawah 5 %. Negara-negara Asean di antaranya : Malaysia, Thailand, Philippina, dan Indonesia berada pada kisaran 50 %.

4.1.3. Ukuran Dewan dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dewan komisaris (KDK) menggambarkan komposisi keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan (pemegang saham perusahaan) dan luar perusahaan (komisaris independen). Data komposisi dewan komisaris perusahaan sampel secara keseluruhan terdapat pada Lampiran 2, dan berikut statistik deskriptif jumlah komisaris dan komposisinya :

Tabel 4.4
Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Manufaktur

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev
Jumlah komisaris	2.00	10.00	4.1125	1.87585
Jum. Kom.Independen	.00	5.00	1.4625	.82591
Komposisi Dewan Komisaris (BOD)	.00	100	37.5584	11.48146

Sumber : Lampiran 2 diolah

Keterangan : Komposisi dewan komisaris yaitu rasio jumlah komisaris Terhadap jumlah komisaris.

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota komisaris yaitu 4 orang, minimum 2 orang dan maksimum 10 orang. Jumlah komisaris independen minimal 0 orang dan maksimum 5 orang. Jumlah komisaris terbanyak terdapat pada PT.Astra Internasional,Tbk.(10 Orang).

Rata-rata komposisi dewan komisaris (KDK) sebesar 35,88 %, komposisi minimum 0 % dan komposisi maksimum 66,66 %. Penelitian Budiwijaksono (2005) melaporkan rata-rata komposisi dewan komisaris pada Tahun 2001 dan

2002 masing-masing 35,03 % dan 37,35 %. Jika komposisi tersebut diperbandingkan, nampak komposisi dewan komisaris pada emiten industri manufaktur tidak mengalami perubahan signifikan, dan cenderung stabil.

4.1.4. Kompetensi Dewan Komisaris

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang memiliki anggota komisaris yang kompeten pada bidang akuntansi dan atau keuangan (KPKD) yaitu 70 % perusahaan (56 perusahaan), sisanya 30% perusahaan (24 Perusahaan) belum menempatkan komisaris yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan.

4.1.4. Kualitas Audit dengan Proksi Spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik

Spesialisasi industri kantor akuntan publik (KAP) pada penelitian ini merupakan proksi dari kualitas audit. Seperti telah dijelaskan pada bab III, pengukuran spesialisasi industri KAP menggunakan variable rasio yaitu jumlah % pangsa pasar audit.

Berdasarkan definisi Craswell et al (1995) industri manufaktur di BEI terklasifikasi dalam 3 kelompok industri besar yaitu : (1) industri dasar dan kimia, (2) aneka industri, dan (3) industri barang konsumsi. Berikut adalah KAP yang menguasai pangsa pasar klien lebih dari 3 % sebagai berikut :

Nama Kantor Akuntan Publik	Klien	%
Purwantono, Sarwoko & Rekan	15	18.29268
Osman Bing Satrio & Rekan	10	12.19512
Haryanto Sahari & Rekan	5	6.09756
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan	5	6.09756

Kosasih & Nurdiyaman	5	6.09756
Haryanto Sahari & Rekan	5	6.09756
Aryanto Amir Jusuf & Mawar	4	4.87805
Siddharta Siddharta & Widjaja	4	4.87805
Adi Jimmy Arthawan	3	3.65854
Mulyamin Sensi Suryanto	3	3.65854
Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja	3	3.65854
Johan Malonda Astika & Rekan	3	3.65854
Ngurah Arya & Rekan	3	3.65854

4.1.6. Pengungkapan Sukarela Perusahaan Manufaktur

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi dan regulasi lainnya. Penelitian ini membatasi pada aspek kelengkapan pengungkapan sebagai dimensi kualitas pengungkapan. Kelengkapan pengungkapan diukur dengan item pengungkapan sebanyak 80 item pengungkapan, tanpa memberikan pembobotan. Selanjutnya item pengungkapan dinyatakan dalam presentase yaitu rasio total skor terhadap jumlah maksimum skor yang diharapkan. Berikut disajikan tabel statistik deskriptif persentase pengungkapan sukarela :

Tabel 4.8.
Persentase pengungkapan sukarela Perusahaan Manufaktur

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Dev
Pengungkapan sukarela (%)	20.00	98.75	75.17	18.488

Sumber : Lampiran diolah.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan 75,17 %, artinya pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan berkisar 75,17 % dari seluruh total item pengungkapan yang diharapkan. Hal ini berarti praktik pengungkapan oleh emiten masih relatif baik. Hasil pengungkapan sukarela untuk seluruh emiten disajikan pada Lampiran.

Pengungkapan sukarela yang dinilai mencakup 10 aspek yaitu: (1) sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan; (2) deskripsi strategi perusahaan; (3) ikhtisar kinerja keuangan; (4) deskripsi kualitas produk dan jaringan pemasaran; (5) informasi latar belakang komisaris dan direksi perusahaan; (6) analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan; (7) informasi tentang proyeksi dan prospek bisnis; (8) informasi karyawan; (9) kebijakan dan tanggung jawab sosial; dan (10) informasi tata kelola perusahaan. Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis akan mengklasifikasikan persentase jumlah emiten yang memberikan pengungkapan pada empat katagori yaitu :

Tabel 4.9
Klasifikasi persentase emiten yang memberikan pengungkapan

Persentase jumlah emiten	Katagori
Persentase $\geq 75\%$	Sangat Banyak
$75\% > \text{Persentase} \geq 50\%$	Cukup
$50\% > \text{Persentase} \geq 25\%$	Sedikit
$25\% > \text{Persentase} \geq 0\%$	Sangat sedikit

4.2. Pengujian Model Regresi

Analisis data dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis penelitian yang terdiri atas 12 hipotesis. Analisis ini menggunakan model analisis regresi berganda model analisis regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 6, yaitu hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan pernyataan pengaruh variabel kepemilikan institusional, karakteristik Dewan komisaris, dan kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela

Tabel 4.10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.364(a)	.133	.061	17.91346	.133	1.858	6	73	.100

a Predictors: (Constant), LOGPNJ, KDK, KI, KPDK, AUDIT, UDK

Keterangan :

Ket : KI=Kepemilikan instirusional; KDK=Komposisi Dewan Komisaris; UDK=Ukuran Dewan Komisaris; KPDK=Kompetensi Dewan Komisaris; LogPNJ=Ukuran perusahaan;ML=Manajemen laba; PS=Pengungkapan sukarela.

Tabel 4.10 juga memperlihatkan analisis regresi bahwa *adjusted R determinant* sebesar 0,061 , F sebesar 1, 858, tingkat signifikansi 0,1. Dengan demikian, model persamaan sub analisis regresi kedua dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Untuk mendapatkan hasil regresi yang efisien dan akurat, data hasil sampling yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu harus terbebas dari pelanggaran asumsi klasik untuk itu perlu dilakukan uji asumsi klasik , yaitu : (1) uji multikolinieritas; (2) uji heterokedastisitas; dan (3) uji normalitas. Mengingat data penelitian berupa data *cross sectional* dan tidak ada data *time series*, maka uji autokorelasi tidak diperlukan. Berdasarkan pengujian data terhadap ketiga kaedah yang mendasari asumsi klasik (Lampiran)

Berdasarkan pengujian menunjukkan kedua model analisis regresi tersebut memiliki nilai *tolerance* (TOL) lebih besar dari 0,10 (TOL > 0,10) dan nilai

variance inflation factor (VIF) yang kurang dari 10 ($VIF < 10$). Nilai ini sangat berlawanan dengan syarat terjadinya multikolinieritas antar variabel bebas dimana nilai *tolerance* harus lebih kecil dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 Hair et al (1995). Maka dapat disimpulkan pada model analisis tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

- a. Uji kedua adalah uji heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser (Gujarati, 2003), yaitu dengan meregresi kembali variabel independen (hasil regresi sebelumnya saat uji multikolinieritas) pada model analisis. Lampiran 16 dan 17 pada bagian uji heterokedastisitas, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan seluruh koefisien regresi variabel independen tidak signifikan, karena nilai $SIG > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Hasil uji heterokedastisitas selanjutnya dilakukan uji normalitas. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah *disturbance error* memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas menggunakan uji kolmogorov-Smirnov (Singih Santoso 2002). Kriteria pengujian yaitu jika angka signifikansi ($SIG > 0,05$), maka data berdistribusi normal. Lampiran 16 dan 17 pada bagian uji normalitas menunjukkan nilai $SIG > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian relatif berdistribusi normal.

4.3. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris, Kualitas audit terhadap Pengungkapan Sukarela

Sub analisis regresi model kedua pada penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan pengaruh kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, komposisi Dewan komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris, dan spesialisasi industri KAP terhadap pengungkapan sukarela. Analisis ini untuk menguji hipotesis penelitian ketujuh sampai dengan hipotesis penelitian keduabelas.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya model analisis yang dipilih untuk menguji hipotesis pertama sampai dengan kelima adalah model analisis regresi yaitu :

$$PS_{it} = a_1 + d_1 KI_{it} + d_2 KDK + d_3 UDK + d_4 KPDK + d_5 AUDIT + d_6 LOG PNJ_{it} + \varepsilon_{1.it}$$

Keterangan :

Ket : KI=Kepemilikan instirusional; KDK=Komposisi Dewan Komisaris; UDK=Ukuran Dewan Komisaris; KPDK=Kompetensi Dewan Komisaris; LogPNJ=Ukuran perusahaan; PS= Pengungkapan sukarela.

Hasil regresi secara lengkap disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.11

Ringkasan Hasil Regresi Variabel Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris, Spesialisasi Industri KAP terhadap Pengungkapan Sukarela

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	54.052	17.486		3.091	.003
	KI	.008	.088	.011	.097	.923
	KDK	.102	.128	.092	.793	.430
	UDK	.615	1.217	.062	.505	.615
	KPDK	12.719	4.544	.317	2.799	.007
	AUDIT	.552	.355	.442	2.353	.097
	LOGPNJ	.729	3.183	.030	.229	.819

a. Dependent Variable: PS

Keterangan :

Ket : KI=Kepemilikan instirusional; KDK=Komposisi Dewan Komisaris; UDK=Ukuran Dewan Komisaris; KPDK=Kompetensi Dewan Komisaris; LogPNJ=Ukuran perusahaan; PS= Pengungkapan sukarela.

4.5.1. Pengaruh Simultan Kepemilikan Institusional, Karakteristik Dewan dan Kualitas audit terhadap Pengungkapan Sukarela.

1) Hasil Penelitian

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa adjusted R *square* sebesar 0,061 artinya bahwa variabel independen kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, komposisi Dewan komisaris, Kompetensi Dewan Komisaris, dan spesialisasi industri KAP mampu menjelaskan 6,1 % variasi dari pengungkapan sukarela. Jika dilihat F test-nya yang menunjukkan tingkat signifikansi 0,1, model tersebut cocok untuk digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris perusahaan, komposisi dewan komisaris, kompetensi Dewan Komisaris ,dan spesialisasi industri KAP

secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, pada tingkat signifikansi 0,1. Sehingga **hipotesis ketujuh** yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris perusahaan, komposisi dewan komisaris, kompetensi Dewan Komisaris, dan spesialisasi industri KAP secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dapat **diterima**.

2) Pembahasan

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11. hasil statistik regresi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* 0,061, nilai F 8,225, dan nilai F signifikansi 1.8. Ini memberikan petunjuk bahwa besaran pengungkapan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris perusahaan, komposisi dewan komisaris, kompetensi Dewan Komisaris, dan spesialisasi industri KAP sebesar 6%. Jika memperhatikan *adjusted R* determinan tergolong rendah.

4.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

1) Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis parsial: hipotesis ketujuh sampai dengan duabelas dilakukan dengan melihat koefisien regresi (*unstandardized coefficient*) dan signifikansi nilai t. Koefisien beta (*Standardized coefficient*) dapat digunakan untuk mengetahui besaran relatif *coefficient*, sehingga secara relatif dapat diperbandingkan. Dari Tabel 4.11 tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kepemilikan institusional adalah 0,011 dengan tingkat signifikansi 0,923. Koefisien tersebut bertanda plus menunjukkan arah hubungan positif, sesuai

dengan teori yang dihipotesiskan. Jika memperhatikan tingkat signifikansi maka **hipotesis kedelapan** yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela **ditolak**.

2) Pembahasan

Sebagaimana tersaji pada Tabel 4.11, koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,011 bertanda positif, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan akan semakin meningkatkan besaran pengungkapan sukarela, namun tidak signifikan.

Berdasarkan Tabel 4.24 Konsentrasi kepemilikan hanya mampu menjelaskan secara secara tidak signifikan. Beberapa alasan yang dapat digunakan mengapa pemegang saham mayoritas tidak terlalu tertarik terhadap pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: (1) sebagai pemegang saham pengendali, mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa melalui laporan keuangan dan laporan tahunan, sehingga pemegang saham mayoritas tidak begitu tertarik dengan pengungkapan sukarela; dan (2) sebagai strategi dalam persaingan, beberapa informasi penting sengaja ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para pesaing perusahaan.

4.5.3. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

1) Hasil Penelitian

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11 koefisien regresi Komposisi Dewan Komisaris (KDK) menunjukkan sebesar 0,092 dengan tingkat signifikansi 0,430. Koefisien regresi bertanda positif, menunjukkan variabel komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan sukarela, sesuai dengan teori. Namun jika memperhatikan tingkat signifikansi berarti komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian **hipotesis kesembilan** yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela **ditolak**.

2) Pembahasan

Hasil penelitian yang menunjukkan lemahnya hubungan komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela dapat disebabkan oleh Rendahnya komposisi dewan komisaris, data statistik menunjukkan rata-rata jumlah komisaris independen sebesar 38 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi komisaris independen.

4.5.4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

Sebagaimana disajikan pada tabel 4.11 koefisien regresi Ukuran Dewan Komisaris (UDK) menunjukkan sebesar 0,615 dengan tingkat signifikansi 0,615. Koefisien regresi bertanda positif, menunjukkan ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan sukarela, sesuai dengan teori. Namun jika memperhatikan tingkat signifikansi ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Dengan demikian **hipotesis**

kesepuluh yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela **ditolak**.

4.5.5. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela

1) Hasil Penelitian

Sebagaimana disajikan pada tabel 4.11 koefisien regresi Kompetensi Dewan Komisaris (KDK) menunjukkan sebesar 12.719 dengan tingkat signifikansi 0,007. Koefisien regresi bertanda positif, menunjukkan kompetensi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan sukarela, sesuai dengan teori. Dengan demikian **hipotesis kesebelas** yang menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela **diterima** pada tingkat signifikansi 0,05.

2) Pembahasan

Berdasarkan hasil di atas, hasil penelitian ini bermakna bahwa kehadiran anggota komisaris yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan dapat meningkatkan peran pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen dalam praktik transparansi dan pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan.

4.5.6 .Pengaruh Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela.

1) Hasil Penelitian

Sebagaimana tersaji pada tabel 4.11 spesialisasi industri KAP (Audit) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, sesuai dengan teori. Jika memperhatikan tingkat signifikansinya berarti spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,1. Dengan demikian **hipotesis keduabelas** yang menyatakan bahwa kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela **diterima**.

2) Pembahasan

Berdasarkan hasil di atas, hal ini berarti bahwa penggunaan KAP spesialisasi industri pada audit keuangan perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan sukarela. Hal ini mengindikasikan bahwa : (a) pengalaman serta pengetahuan KAP spesialis tentang industri dan kebijakan penyajian pelaporan keuangan perusahaan industri, telah dimanfaatkan oleh klien dalam rangka pengembangan kebijakan pengungkapan di perusahaannya; (b) dalam rangka menjaga reputasi, menghindari litigasi, dan kegagalan audit, KAP spesialis mendorong kliennya untuk memberikan pengungkapan tambahan.

Berdasarkan *review* terhadap penelitian sebelumnya, hasil temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Dunn dan Mayhew (2004), serta Schauer (2004), Nuryaman (2009) yang menyatakan bahwa spesialisasi industri KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Temuan penelitian di BEI ini tidak mendukung hasil penelitian Peters et al (2005) yang menyimpulkan spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Peter et al (2005), disebabkan oleh perbedaan dalam pengukuran pengungkapan sukarela. Peters dalam penelitiannya menggunakan instrumen untuk mengukur praktik pengungkapan tentang produk dan turunannya (*derivative product*) dengan berbagai aspeknya, di antaranya pengungkapan atas; pengelompokan produk derivatif, pengaruh fluktuasi harga produk derivatif, laba atau rugi derivatif, nilai produk derivatif, dan sebagainya. Dengan demikian, instrumen penelitian Peter tidak cocok apabila digunakan untuk mengukur praktik pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan. Sedangkan instrumen pengungkapan pada penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur praktik pengungkapan secara umum pada pelaporan keuangan. Jika dilihat dari tujuan pelaporan keuangan yaitu menyampaikan informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, maka instrumen pengungkapan yang digunakan pada penelitian ini lebih valid bila dibandingkan dengan instrumen penelitian Peters (2005), sebab instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur berbagai aspek informasi yang selayaknya diungkapkan pada pelaporan keuangan.

Sebagaimana tersaji pada tabel 4.11 koefisien regresi ukuran perusahaan menunjukkan sebesar 0,729 dengan tingkat signifikansi 0,819. Dengan memperhatikan tingkat signifikansi, maka ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada tingkat signifikansi 0,1. Hasil temuan penelitian ini tidak konsisten dengan Haniffa dan Cooke (2002), Leung et al (2005) dan Nuryaman (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Jika memperhatikan pengungkapan sukarela saat ini dengan rata-rata indeks pengungkapan 75 % mengindikasikan pengungkapan sudah relatif baik dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya rata-rata 48 % (Nuryaman 2008). Kesadaran akan pentingnya transparansi dan pengungkapan informasi di perusahaan (Perusahaan besar maupun kecil) telah tumbuh.



Utama
UNIVERSITAS WIDYATAMA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, ukuran Dewan Komisaris dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP), secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
- 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Ini mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menimbulkan *entrancement effect* terhadap pengungkapan sukarela.
- 2) Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya komposisi dewan komisaris atau tidak signifikannya jumlah anggota komisaris independen dalam susunan keanggotaan dewan komisaris, sehingga secara kolektif komisaris independen tidak memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi berbagai kebijakan dewan komisaris, termasuk kebijakan dalam pengendalian terhadap praktik pengungkapan.
- 3) Ukuran Dewan Komisaris belum dapat menjadi model *corporate governance* untuk mengendalikan praktik pengungkapan di Perusahaan.
- 4) Kehadiran anggota komisaris yang kompeten dalam bidang akuntansi dan atau keuangan, dapat menjadi model *corporate governance* untuk

mengendalikan praktik pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan. Kompetensi anggota komisaris berdampak positif untuk meningkatkan transparansi/pengungkapan pelaporan keuangan.

- 5) Kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Ini bermakna bahwa kualitas audit dapat meningkatkan pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa : (a) pengalaman dan pengetahuan KAP spesialis tentang industri tertentu, serta pengalaman dan pengetahuannya atas kebijakan penyajian pelaporan keuangan perusahaan industri telah dimanfaatkan oleh klien dalam rangka pengembangan kebijakan pengungkapan di perusahaannya; (b) dalam rangka menjaga reputasi, menghindari litigasi, dan menghindari kegagalan audit, KAP spesialis mendorong kliennya untuk memberikan pengungkapan tambahan; dan (c) dalam rangka peningkatan transparansi dan pengendalian kebijakan pengungkapan pada pelaporan keuangan, maka kualitas audit dapat menjadi mekanisme *corporate governance* di perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan, maka diajukan saran-saran untuk kepentingan pengembangan ilmu dan operasional.

5.2.1 Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu

- 1) Variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan ukuran kepemilikan saham mayoritas pada individu. Dalam kenyataannya dapat

terjadi manajemen dikendalikan oleh sekelompok pemegang saham pengendali secara kolektif. Untuk itu, peneliti berikutnya perlu mencoba menggunakan proksi konsentrasi kepemilikan oleh kelompok tertentu misal kepemilikan oleh keluarga, atau kepemilikan oleh kelompok bisnis.

- 2) Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah emiten yang memiliki komposisi dewan komisaris yang dominan (minimal 50 %) relatif sedikit. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat disarankan menambah sampel penelitian dengan periode yang berbeda, atau jenis industri yang lain sehingga diharapkan jumlah data emiten dengan komposisi dewan komisaris yang dominan lebih banyak. Atau dengan kata lain, melakukan penelitian kembali untuk periode yang lebih panjang.
- 3) Pengukuran variabel pengungkapan sukarela dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan bobot relevansi item pengungkapan. Jika item-item pengungkapan diberi bobot relevansi berdasarkan prosedur tertentu, mungkin akan memberikan hasil pengukuran pengungkapan sukarela yang berbeda, serta hasil penelitian yang berbeda. Untuk itu, peneliti yang akan datang disarankan memberikan bobot relevansi terhadap item pengungkapan sukarela.

5.2.2 Untuk Kepentingan Operasional

Saran yang diajukan untuk kepentingan operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian menunjukkan untuk mendukung efektivitas pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu dewan

komisaris yang memiliki karakteristik independen, kompeten dalam bidang akuntansi dan atau keuangan, serta kredibel baik secara individu maupun secara institusi, karena hasil penelitian menunjukkan kompetensi Dewan dapat mempengaruhi efektivitas Dewan Komisaris.

- 2) Hasil penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas audit yang diproksi dengan spesialisasi industri KAP terhadap pengungkapan sukarela, memberikan bukti empirik terhadap para praktisi, perusahaan dan regulator bahwa audit yang berkualitas dapat dijadikan model mekanisme *corporate governance* terhadap praktik pengungkapan pada pelaporan keuangan.
- 3) Kepada para akuntan praktisi atau Kantor Akuntan Publik disarankan untuk dapat meningkatkan kompetensi, melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan terhadap auditor atau memberikan tambahan pengalaman di lapangan, termasuk di antaranya peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap PSAK.

5.3. Kontribusi Hasil Penelitian dan Implikasinya bagi Pengembangan Ilmu

5.3.1. Kontribusi Hasil Penelitian

Temuan dari disertasi ini adalah rekonseptualisasi, yaitu berupa temuan model mekanisme *corporate governance* khususnya bagi emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Temuan inovasi model mekanisme tersebut adalah kompetensi dewan komisaris, dan kualitas audit sebagai model mekanisme *corporate governance*. Temuan empirik pada penelitian ini yaitu kompetensi Dewan

Komisaris dan kualitas audit dapat meningkatkan pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan.

5.3.2. Implikasi Hasil Penelitian bagi Pengembangan Ilmu

Implikasi hasil penelitian ini bagi pengembangan ilmu adalah sebagai berikut

:

- 1) Akuntansi Keuangan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan *positive accounting theory*. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik akuntansi, dan menguji secara empiris keabsahan hipotesis tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan.
- 2) Studi *Corporate governance*. Hasil penelitian ini menjadi bukti empirik Kompetensi Dewan Komisaris dan Kualitas audit dapat berperan sebagai mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi persoalan keagenan (*agency problem*) dalam upaya meningkatkan transparansi informasi pada pelaporan keuangan.
- 3) Audit keuangan. Hasil temuan penelitian ini memberikan bukti empirik dalam pengembangan audit keuangan. Kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan auditor pada industri tertentu dapat berperan dalam mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih baik pada pelaporan keuangan. Karena itu, di samping independensi, kompetensi

auditor eksternal menjadi syarat mutlak untuk memberikan jasa audit yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Babic, Verica. 2001. The Key Aspects of the Corporate Governance Restructuring in the Transition Process". *Ekonomist*, Vol.33.No.2.
- _____. 2005. Corporate Governance Problem in Transition Economies. *Ekonomist*, Vol.33, No.2, pp. 133-143
- Badan Pengawas Pasar Modal. 1996. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
- _____. 2002. Pedoman penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Manufaktur
- Bailey, B, et al , et al. *The Economic Consequences of Increased Disclosure: Evidence from International Cross Listing*. Working Paper. Cornell University . at al wbb @ cornel.edu
- Barnhart, Scott and Rosentein, Stuart. 1998. Board Composition ,Managerial Ownership, and Firm Performance : An Empirical Analysis. *The Financial Review* . November 1998 : 33,4
- Chau, Gerald K. and Sidney J.Gray. 2002. Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hongkong and Singapore. *The International journal of accounting* 37 p 247-267.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Daniel N.Gao and Oliver M.Rui. 2005. Ownership structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate finance* , XX (2005) , XXX-XXX
- Cheng, Eugene C.M. and Stephen M.C. 2004. *Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure*. Working paper research projects. Nanyang Technological University.
<http://www.business.Utuc.edu/ciera/conference>
- Choi, Frederik, D.S. 1992. *International Accounting, Second Ed*. Prentice Hall.Inc.New Jersey.
- Claessens, Stijin and Joseph P.H. Fan. 2002. Corporate Governance in Asia : A Survey. *International Review of Finance*, 3:2.p71-103, Oxpord.

- Cooper, R., Donald and Pamela S. Schindler. 2003. *Business Research Methods*, 8th ed. McGraw-Hill Companies, Inc. USA.
- Craswell, Allen T., Jere R. Francis dan Stephen L. Taylor. 1995. Auditor Brand Name and Reputations and Industry Specialization. *Journal of Accounting and Economics* (20). 297-322.
- Dallas, George .2004. *Governance and Risk. Analytical Hand books for Investors, Managers, Directors and Stakeholders*, p.21. Standard and Poor. Governance Services, MC. Graw Hill. New York
- DeAngelo, L.E.1986. Accounting Number as valuation substitutes. A Study of Management buyouts of public stockholder, *The Accounting Review*, vol.59, 400-420
- Dunn, Kimberly A and Mayhew, Brian W. 2004. Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality. *Review of Accounting Studies*, Vol. 9, pp 35-58. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
- Eisenhad, Kathleen M..1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, Vol.62, July, 533-541.
- Eng, L.L and Y.T Mak .2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325-345
- Fama, Eugene F. 1970. Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance* No.67,P.234-279.
- _____.1980. Agency Problems and The Theory of the Firm. *Journal of Political Economy*, vol. 88, no.21
- _____ and M.C.Jensen. 1980. Separation of Ownership and Control. *journal of law and Economics* 88 (2), 301-325
- Fan, Joseph.P.H and Stijin Claessens. 2001. Corporate Governance in Asia: A Survey. *International Review of Finance*, 3:2, 2002:pp71-103.
- Financial Accounting Standards Boards.1983. *Accounting Standards; Statement of Financial Accounting Concept* 1-6, McGraw-Hill Book Company. USA.
- _____1997. "Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 1 :Objevtives of Financial Reporting by Business Enterprises." Stanford Connecticut. November.
- Fitriany, 2001. Signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada Laporan keuangan perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, SNA IV Bandung)

- Forker, J.J. (1992), Corporate Governance and disclosure quality. *Accounting and Business Research*, 22. 273-280.
- Gerald K. Chau and Sidney J.Gray, 2002, Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore, *The International Journal of Accounting* 37 (2002) 247-265.
- Haniffa, R.M and T.E. Cooke, 2002, Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporation. *ABACUS*, Vol. 38. No 3, 2002.
- _____ and Krisnan,G. Palepu. 2001. Information asymmetry, Corporate Disclosure, and Capital Market. A Review of Empirical Disclosure literature. *Journal of Accounting and Economic* 31. p.405-440
- Ho, S.S.M and Wong, K.S (2001). A study of the relation between corporate governance structure and the extend of voluntary disclosure. *Journal of international Accounting Auditing and Taxation*, 10 (2), 139-156.
- Hubert Ooghe and Tine De Langhe, 2002. The Anglo-American Versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium. *European Business Review*, volume 14-number 6-2002-pp.437-449.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2004. Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, per 1 Januari 2001. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jensen, Michael C. and William H.Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure* dalam Organizational Economic, Jossey –Bass Publihers. San Francisco London.
- Karim, AKM Waresul and Jamal Uddin Ahmed, 2005. Determinan of IAS disclosure compliance in emerging economic: Evidence from exchange listed companies in Bangladesh. Working paper no. 21, 2005. <http://www.accounting-research.org.nz>
- La Porta R.,F. and Lopez-de Silanes. 1999. Corporate Ownership around the word. *Journal of Finance* 54, 471-518.
- Lakhal, Faten. 2004. *Voluntary Earnings Disclosure and Corporate Governance: Evidance from France, working paper*, Institute de Recherche en Gestion and ESA Universite Paris XII, faten_lakhal@yahoo.fr

- Lueng ,C.,Stephen et al .2005. *Determinants of Corporate Disclosure and Transparency: Evidance from Hong Kong and Thailand*. City University of Hong Kong. Piman.limpaphayom@sasin.edu
- Lipton,L. And J.Lorsh, 1992, A modest proposal for improved corporate governance, *The Business Lawyers* 48, 59-77.
- Marwata. 2001. Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Prusahaan Publik di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mayhew, Brian W and Michael Wilkins. 2003. Audit Firm Industry Specialization as a Differentiation Strategy: Evidence from Fees Charged to Firms Going Public. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 22, No.2, pp 33-52
- Mohd,N.,Norita and Shamsul Nahar Abdullah. 2005. *Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distresses Firms in Malaysia*. Monash University Malaysia
norita.nasir@buseco.monash.edu.my, snahar@uum.edu.my
- Monks, R.A.G and N.Minow. 2001. *Corporate Governance, 2nd ed*, Blackwell Publishing
- Musnadi, Said. 2006. Kajian tentang Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Tipe Kepemilikan dan Tipe Pengendalian sebagai Mekanisme Corporate Governance, serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Disertasi. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Neal, Terry L. and Riley, JR., Richard. 2004. Auditor Industry Specialist Research Design. *Auditing : A Journal of Practice and Theory* Vol.23, N0.2, pp167-177
- Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1A butir C Tentang Pembentukan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan , tertanggal 30 juni yang diubah dengan Kep-339/BEJ/07-2001 tertanggal 20 juli 2001
- Peters, Gary F, Lawrence J.Abbott, Susan Parker. 2005. Voluntary Disclosure and Auditor Specialization: The Case of Commodity Derivative Disclosure. *Working paper*, University of Georgia.
- Rajgopal, Shivaram, Mohan Venkatachalam, 1999. The Role Institutional Investor in Corporate Governance: En Empirical Investigation". *Working Paper*. University of Washington, Seattle May.

- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. 1999. Alfabeta. Bandung
- Suripto, Bambang dan Zaki Baridwan. 1999. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan. *Simposium Nasional Akuntansi II*, Universitas Brawijaya Malang.
- Tjager (2003). Corporate governance. *Tantangan dan kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Utami, Wiwik. 2005. Dampak Pengungkapan Sukarela dan Manajemen laba terhadap Biaya Modal Ekuitas dengan Asimetri Informasi sebagai Variabel Intervening, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Wilkins, Michael.S and Mayhew Brian., 2003. Audit Firm Industry: Specialization as a Differentiation Strategy: Evidence from Fees Charged to Firm Going Public. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 22, No.2, September 2003, pp.33-52.
- Willekens, Marleen, Heidi Vader Bauhede, Ann Gaeremynck, Linda Van De Gucht, 2003. The Impact of Internal and External Governance Mechanisms on the Voluntary Disclosure of Financial and Non-financial Performance. Marleen willekens@econ.kulueven.ac.be
- World Bank. 1999. Corporate Governance: *Framework for Implementation, Overview*. www.worldbank.org pp.5
- _____. 2004. *Report on The observance of Standards and Codes (ROSC) Corporate Governance County Assessment Republic of Indonesia*, Bapepam, Jakarta
- Yermack, D.(1996). Higher market valuation of companies with small board of directors. *Journal of Financial Economics*, vol.40,pp 185-211.
- Zou, Jian and Elder, Randal. 2001. Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offering Firms. Working paper. School of Management, State University of New York at Bringhamtom, jizhou88@hotmail.com

Lam 1:Data Perusahaan

NO	PRSH	PNJ	LOGPNJ	K.INST	KDK	UDK	KI	AUDIT	PS
1	ADMG	4002532	6.6	30	20	5	1	12.2	42.5
2	AISA	20035	4.3	24	33.333	6	2	4.88	20
4	ALMI	2376798	6.38	37	20	5	1	6.1	51.3
5	AQUA	2331532	6.37	94	33.222	3	1	6.1	51.3
6	ARNA	647125	5.81	25	100	2	2	18.29	77.5
7	ARTI	517776	5.71	80	100	3	1	2.44	77.5
8	ASII	9.7E+07	7.99	50	50	10	5	6.1	70
9	AMFG	2235021	6.35	44	42.8	7	3	4.88	46.3
10	BATI	1419203	6.15	79	28.5714	4	3	1.22	55
11	BRAM	33600	4.53	53	50	7	2	1.22	93.75
12	BRPT	1.8E+07	7.26	52	0	6	0	12.2	98.75
13	BTON	172390	5.24	54	50	2	1	12.2	92.5
15	CLPI	504660	5.7	58	33.3333	3	1	3.66	77.5
17	DYNA	1382073	6.14	29	33.3333	3	1	18.29	85
18	EKAD	182649	5.26	75	33.3333	3	1	1.22	85
19	ESTI	569121	5.76	59	33.3333	4	1	18.29	71.25
21	FISH	2332493	6.37	73	50	2	1	1.22	32.5
22	FPNI	3707543	6.57	90	33.3333	3	1	18.29	85
23	GDYR	1244519	6.1	85	33.3333	3	1	6.1	66.25
24	GGRM	3E+07	7.48	67	75	4	3	4.88	96.25
25	GJTL	7963473	6.9	28	42.8571	7	3	12.2	88.75
26	HDTX	1204108	6.08	23	33.333	3	1	1.22	88.75
27	HMSP	3.5E+07	7.54	98	33.3333	6	2	6.1	95
28	IGAR	469501	5.67	63	25	4	1	3.66	95
29	IKAI	245658	5.39	45	0	2	0	6.1	87.5
30	IKBI	1645326	6.22	88	40	5	2	18.29	87.5
31	INAF	1478585	6.17	81	25	4	1	1.22	87.5
32	INAI	642018	5.81	33	20	5	2	6.1	87.5
34	INDF	3.9E+07	7.59	50	30	9	2	18.29	87.5
36	INTP	9780498	6.99	65	44.4444	7	3	18.29	76.25
37	JPRS	732703	5.86	20	33.3333	3	1	12.2	87.5
38	KAEF	2704728	6.43	90	50	6	3	1.22	87.5
39	KARW	277713	5.44	53	33.3333	3	1	3.66	87.5
40	KBLI	1731928	6.24	31	33.3333	3	1	12.2	87.5
41	KDSI	1078022	6.03	49	50	4	2	6.1	88.75
42	KICI	93194	4.97	44	33.3333	3	1	6.1	70
43	KKGI	338376	5.53	33	50	4	2	3.66	72.5

44	KLBF	7877366	6.9	10	33.3333	6	2	18.29	72.5
46	LION	229607	5.36	29	33.3333	3	1	6.1	80
47	LMPI	326182	5.51	18	100	2	1	3.66	83.75
48	LMSH	163316	5.21	26	33.3333	3	1	6.1	82.5
50	MAIN	1729647	6.24	77	33.3333	3	1	1.22	76.25
51	MERK	637134	5.8	74	33.3333	3	1	4.88	37.5
52	MLBI	1325661	6.12	76	40	5	2	4.88	86.25
53	MRAT	307804	5.49	71	33.3333	3	1	6.1	80
54	MYOR	3907674	6.59	33	33.3333	3	1	3.66	82.5
56	NIPS	480457	5.68	37	33.3333	3	1	1.22	76.25
57	PAFI	327826	5.52	12	33.3333	3	1	1.22	76.25
58	PBRX	1758095	6.25	21	33.3333	9	3	6.1	93.75
59	PICO	600190	5.78	76	33.3333	3	1	1.22	88.75
60	PRAS	410673	5.61	45	33.3333	3	1	1.22	35
61	PSDN	7.00E+08	8.85	57	33.3333	6	2	18.29	81.25
62	PYFA	119580	5.08	54	33.3333	3	1	1.22	31.3
63	RDTX	205571	5.31	38	0	3	0	3.66	86.25
65	SCCO	2127031	6.33	30	50	4	2	1.22	61.25
66	SCPI	204011	5.31	65	33.3333	3	1	12.2	78.75
68	SIMM	45704	4.66	69	33.3333	3	1	1.22	78.75
69	SIPD	2331686	6.37	3	50	4	2	3.66	78.75
70	SKLT	313125	5.5	27	33.3333	3	1	6.1	77.5
71	SMAR	1.6E+07	7.21	95	0	3	0	3.66	45
73	SMSM	1353586	6.13	70	33.3333	3	1	3.66	48.8
74	SOBI	1493210	6.17	70	33.3333	3	1	18.29	92.5
75	SPMA	1037542	6.02	30	40	5	2	3.66	86.25
76	SQBI	358937	5.56	91	33.3333	3	1	12.2	92.5
77	SRSN	313919	5.5	35	22.2222	9	2	3.66	40
79	STTP	624400	5.8	57	33.3333	3	1	3.66	82.5
80	SMGR	1.2E+07	7.09	52	33.3333	3	1	18.29	55
81	SULI	1097078	6.04	52	40	5	2	18.29	88.75
84	TBLA	3955846	6.6	27	50	2	1	3.66	88.75
85	TBMS	4405039	6.64	42	40	6	2	18.29	88.75
86	TCID	1239775	6.09	61	40	5	2	12.2	88.75
87	TIRA	254706	5.41	43	33.3333	3	1	1.22	88.75
88	TIRT	647297	5.81	34	50	2	1	3.66	66.25
89	TOTO	1124346	6.05	40	33.3333	3	1	18.29	40
90	TRST	1810919	6.26	18	33.3333	3	1	18.29	58.75
92	ULTJ	1362606	6.13	21	66.6667	3	2	1.22	67.5
93	VOKS	2267484	6.36	29	50	2	1	1.22	88.75
95	AUTO	5337720	6.73	94	22.222	9	2	6.1	86.25

96	BUDI	1551987	6.19	26	40	5	2	3.66	97.5
97	DLTA	1177061	6.07	58	40	5	2	12.2	60

Keterangan :

Prsh : Perusahaan

KI : Kepemilikan Institusional

AUDIT : Kualitas audit

LOGPNJ: Ukuran perusahaan

KDK: Komposisi Dewan Komisaris

UDK: Ukuran Dewan Komisaris

LAMPIRAN 2 : Jumlah Klien KAP, Pangsa pasar KAP (%) pada Industri Manufaktur

Purwantono, Sarwoko & Rekan	15	18.29268
Osman Bing Satrio & Rekan	10	12.19512
Haryanto Sahari & Rekan	5	6.09756
Haryanto Sahari & Rekan	5	6.09756
Kosasih & Nurdiyaman	5	6.09756
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan	5	6.09756
Kosasih & Nurdiyaman	5	6.09756
Haryanto Sahari & Rekan	5	6.09756
Aryanto Amir Jusuf & Mawar	4	4.87805
Siddharta Siddharta & Widjaja	4	4.87805
Adi Jimmy Arthawan	3	3.65854
Mulyamin Sensi Suryanto	3	3.65854
Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja	3	3.65854
Johan Malonda Astika & Rekan	3	3.65854
Ngurah Arya & Rekan	3	3.65854
Eddy Rintis	1	1.21951
Hadori & Rekan	1	1.21951
Rama Wendra	1	1.21951
Tanubrata Sutanto & Rekan	1	1.21951
Koesbandijah Beddy Samsi Setiasih	1	1.21951
AF Rachman & Soetjipto WS	1	1.21951
Bismar, Muntalib & Yunus	1	1.21951

Darmenta & Tjahjo	1	1.21951
Ferdinand	1	1.21951
Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	1	1.21951
Wirawan & Rekan	1	1.21951
Edi Subyakto	1	1.21951
Hendrawinata Gani & Hidayat	1	1.21951
Kanto Tony Frans & Darmawan	1	1.21951
Arsyad & Rekan	1	1.21951
Anwar & Rekan	1	1.21951
Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	1	1.21951
Jimmy Budhi & Rekan	1	1.21951

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan.



UJIAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Lampiran.5.Kantor Akuntan Publik Perusahaan Manufaktur dan Kelompok Industri Perusahaan.

NO	KODE	NAMA KAP	KEL INDTRI
1	ADMG	Osman Bing Satrio & Rekan	2
2	AISA	Aryanto Amir Jusuf & Mawar	3
4	ALMI	Paul Hadiwinata, Hidayat, rsono & Rekan	1
5	AQUA	Haryanto Sahari & Rekan	3
6	ARNA	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
7	ARTI	Ngurah Arya & Rekan	3
8	ASII	Haryanto Sahari & Rekan	2
9	AMFG	Siddharta Siddharta & Widjaja	1
10	BATI	Eddy Rintis	3
11	BRAM	AF Rachman & Soetjipto WS	2
12	BRPT	Osman Bing Satrio & Rekan	1
13	BTON	Osman Bing Satrio & Rekan	1
15	CLPI	Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja	1
17	DYNA	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
18	EKAD	Kanto Tony Frans & Darmawan	1
19	ESTI	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	2
21	FISH	Arsyad & Rekan	1
22	FPNI	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
23	GDYR	Haryanto Sahari & Rekan	2
24	GGRM	Siddharta Siddharta & Widjaja	3
25	GJTL	Osman Bing Satrio & Rekan	2
26	HDTX	Bismar, Muntalib & Yunus	2
27	HMSP	Haryanto Sahari & Rekan	3
28	IGAR	Aryanto Amir Jusuf & Mawar	1
29	IKAI	Kosasih & Nurdiyaman	1
30	IKBI	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	2
31	INAF	Hadori & Rekan	3
32	INAI	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan	1
34	INDF	Purwantono, Sarwoko & Rekan	3
36	INTP	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
37	JPRS	Osman Bing Satrio & Rekan	1
38	KAEF	Rama Wendra	3
39	KARW	Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja	2
40	KBLI	Osman Bing Satrio & Rekan	2
41	KDSI	Kosasih & Nurdiyaman	3
42	KICI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan	3
43	KKGI	Johan Malonda Astika & Rekan	1

44	KLBF	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	3
46	LION	Kosasih & Nurdiyaman	1
47	LMPI	Adi Jimmy Arthawan	3
48	LMSH	Kosasih & Nurdiyaman	1
50	MAIN	Anwar & Rekan	1
51	MERK	Siddharta Siddharta & Widjaja	3
52	MLBI	Siddharta Siddharta & Widjaja	3
53	MRAT	Kosasih & Nurdiyaman	3
54	MYOR	Mulyamin Sensi Suryanto	3
56	NIPS	Darmenta & Tjahjo	2
57	PAFI	Ferdinand	2
58	PBRX	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan	2
59	PICO	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	1
60	PRAS	Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	2
61	PSDN	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	3
62	PYFA	Tanubrata Sutanto & Rekan	3
63	RDTX	Johan Malonda Astika & Rekan	2
65	SCCO	Wirawan & Rekan	2
66	SCPI	Osman Bing Satrio & Rekan	3
68	SIMM	Edi Subyakto	2
69	SIPD	Aryanto Amir Jusuf & Mawar Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan	1
70	SKLT	Rekan	3
71	SMAR	Mulyamin Sensi Suryanto	3
73	SMSM	Tjahjadi Pradhono & Teramihardja	2
74	SOBI	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
75	SPMA	Adi Jimmy Arthawan	1
76	SQBI	Osman Bing Satrio & Rekan	3
77	SRSN	Aryanto Amir Jusuf & Mawar	1
79	STTP	Adi Jimmy Arthawan	3
80	SMGR	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
81	SULI	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
84	TBLA	Mulyamin Sensi Suryanto	3
85	TBMS	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
86	TCID	Osman Bing Satrio & Rekan	3
87	TIRA	Jimmy Budhi & Rekan	1
88	TIRT	Ngurah Arya & Rekan	1
89	TOTO	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
90	TRST	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	1
92	ULTJ	Koesbandijah Beddy Samsi Setiasih	3
93	VOKS	Hendrawinata Gani & Hidayat	2
95	AUTO	Haryanto Sahari & Rekan	2
96	BUDI	Johan Malonda Astika & Rekan	1
97	DLTA	Osman Bing Satrio & Rekan	3

Lampiran 5. Pengungkapan Sukarela Perusahaan.

No		P1	P2	P3	P4	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
ITEM	ITEM PENGUNGKAPAN	TSPC	TRPK	TKIM	TIRT	SSTM	SOBI	SKLT	RMBA	RDTX	PYPA	PSDN	PROD
1	Sejarah singkat perusahaan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Struktur organisasi perusahaan	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Penj. umum bisnis perusahaan	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Visi / misi atau tujuan perusahaan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Strategi secara umum	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Strategi secara spesifik	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dampak strategi terhadap hasil	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
8	L.Laba rugi perbandingan min 3th	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Neraca perbandingan min.3 th.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ikh.Prb.neraca & laba rugi 5 th	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ikh.delapan kuartal penj. & laba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Rasio profitabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
13	Rasio rentabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
14	Rasio likuiditas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
15	Rasio solvabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
16	Rasio perputaran asset	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
17	Nilai tambah	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Laba per saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Perny.keb. dividen 2 th terakhir	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
20	Penj.dampak inflasi thd hasil-hasil	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Pj.damp. fluk.nilai tukar thd hasil	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
22	Jumlah penjualan dalam unit	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
23	Harga jual per unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Pertum. Penj.dlm unit min 3 th.	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
25	Inf. harga saham min.2 th terakhir	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
26	Inf.vol.shm yg diperd. 2th akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Uraian keg.inves., riset/pengemb.	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
28	Deskripsi tentang produk utama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Deskripsi tentang pasar utama	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
30	Deskrip. Jaminan kualitas produk	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
31	Sertifikasi produk/proses	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
32	Deskripsi pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
33	Deskripsi jaringan pemasaran	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
34	Nama dan jabatan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Latar blk.pend. & karir komisaris	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Nama dan jabatan Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Latar blk. Pend.& karir Direksi .	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Remunerasi komisaris/direksi.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Anal. & pemb. Persediaan	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
40	Anal. & pemb. piutang usaha	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
41	Anal.&pemb. Aktiva lancar	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

42	Anal.&pemb. Investasi, riset	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
43	Anal.&pemb. Kewajiban lancar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Anal.&pemb.Kewaj. tdk lancar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Anal.&pemb. Ekuitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Anal.& pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
49	Anal.&pemb. bunga	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Anal.&pemb. Laba usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Pemb.Dampak perub. Harga	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
56	Peramalan penjualan	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
57	Peramalan laba	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
58	Peramalan <i>cash flow</i>	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
60	Uraian keg.investasi & riset	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
61	Peramalan pangsa pasar	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
62	Jumlah karyawan	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
63	Rincian pegawai	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
64	Pelatihan pegawai.	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
65	Kompensasi /upah min.peg.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
68	Perubahan jumlah pegawai	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
70	Menyediakan pasilitas sosial	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
71	Mendukung program pemerintah	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
75	Desk.Pel. tugas komite audit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
78	Desk.Pl.Tugas satuan peng.intern	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Uraian tersed.Akses informasi	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
80	Desk.Ttg.Tata kelola perusahaan	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH SCORE		54	47	65	53	66	74	62	58	69	66	65	73

P15 P16 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P25 P26 P27 P28



47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
49	Anal.&pemb. bunga	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Anal.&pemb. Laba usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
54	Pemb.Dampak perub. Harga	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	Peramalan penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
57	Peramalan laba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
58	Peramalan <i>cash flow</i>	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	Uraian keg.investasi & riset	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
61	Peramalan pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	Jumlah karyawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
63	Rincian pegawai	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
64	Pelatihan pegawai.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	Konpensasi /upah min.peg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
68	Perubahan jumlah pegawai	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
70	Menyediakan pasilitas sosial	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
71	Mendukung program pemerintah	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
73	Desk. Pel. Tugas dewan komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	Desk. Pel. tugas komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Desk. Pel. Tugas sekr.perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	Desk. Pl. Tugas satuan peng.intern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Uraian tersed.Akses informasi	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80	Desk. Ttg. Tata kelola perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH SCORE		75	61	66	64	64	67	56	71	78	61	70	76

No		P29	P30	P31	P33	P34	P35	P36	P38	P39	P40	P41
ITEM	ITEM PENGUNGKAPAN	GJTL	GGRM	FAST	EPMT	DINA	DVLA	DSUC	BATA	AUTO	ASII	ARNA
1	Sejarah singkat perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Struktur organisasi perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Penj. umum bisnis perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Visi / misi atau tujuan perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
5	Strategi secara umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Strategi secara spesifik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dampak strategi terhadap hasil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	L.Laba rugi perbandingan min 3th	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	Neraca perbandingan min.3 th.	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
10	Ikh.Prb.neraca & laba rugi 5 th	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ikh.delapan kuartal penj. & laba	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
12	Rasio profitabilitas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	Rasio rentabilitas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
14	Rasio likuiditas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
15	Rasio solvabilitas	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
16	Rasio perputaran asset	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
17	Nilai tambah	1	1	1	1	1	0	1	0	1		0
18	Laba per saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Perny.keb. dividen 2 th terakhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Penj.dampak inflasi thd hasil-hasil	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
21	Pj.damp. fluk.nilai tukar thd hasil	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Jumlah penjualan dalam unit	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
23	Harga jual per unit	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
24	Pertum. Penj.dlm unit min 3 th.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
25	Inf. harga saham min.2 th terakhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Inf.vol.shm yg diperd. 2th akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Uraian keg.inves., riset/pengemb.	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
28	Deskripsi tentang produk utama	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
29	Deskripsi tentang pasar utama	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
30	Deskrip. Jaminan kualitas produk	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
31	Sertifikasi produk/proses	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
32	Deskripsi pangsa pasar	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
33	Deskripsi jaringan pemasaran	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
34	Nama dan jabatan Komisaris	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
35	Latar blk.pend. & karir komisaris	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
36	Nama dan jabatan Direksi	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
37	Latar blk. Pend.& karir Direksi	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
38	Remunerasi komisaris/direksi.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1

39	Anal. & pemb. Persediaan	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
40	Anal. & pemb. piutang usaha	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
41	Anal.&pemb. Aktiva lancar	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
42	Anal.&pemb. Investasi, riset	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
43	Anal.&pemb. Kewajiban lancar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
44	Anal.&pemb.Kewaj. tdk lancar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
45	Anal.&pemb. Ekuitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
46	Anal. & pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
49	Anal.&pemb. bunga	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Anal.&pemb. Laba usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Anal. & pemb. Pangsa pasar	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
54	Pemb.Dampak perub. Harga	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
56	Peramalan penjualan	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
57	Peramalan laba	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
58	Peramalan <i>cash flow</i>	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
60	Uraian keg.investasi & riset	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
61	Peramalan pangsa pasar	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
62	Jumlah karyawan	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
63	Rincian pegawai	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
64	Pelatihan pegawai.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
65	Kompensasi /upah min.peg.	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
68	Perubahan jumlah pegawai	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
70	Menyediakan pasilitas sosial	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
71	Mendukung program pemerintah	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	Desk.Pel. tugas komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	Desk.PI.Tugas satuan peng.intern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	Uraian tersed.Akses informasi	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
80	Desk.Ttg.Tata kelola perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH SCORE		71	77	61	54	48	68	70	44	69	76	62

46	Anal.& pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
49	Anal.&pemb. bunga	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
51	Anal.&pemb. Laba usaha	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
54	Pemb.Dampak perub. Harga	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
56	Peramalan penjualan	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
57	Peramalan laba	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
58	Peramalan <i>cash flow</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60	Uraian keg.investasi & riset	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
61	Peramalan pangsa pasar	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62	Jumlah karyawan	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
63	Rincian pegawai	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
64	Pelatihan pegawai.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
65	Kompensasi /upah min.peg.	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
68	Perubahan jumlah pegawai	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
70	Menyediakan pasilitas sosial	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
71	Mendukung program pemerintah	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	Desk.Pel. tugas komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	Desk.Pl.Tugas satuan peng.intern	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
79	Uraian tersed.Akses informasi	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
80	Desk.Ttg. Tata kelola perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
JUMLAH SCORE		48	59	71	73	64	61	58	71	45	74	69	62	68

46	Anal.& pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
49	Anal.&pemb. bunga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
51	Anal.&pemb. Laba usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
54	Pemb.Dampak perub. Harga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
56	Peramalan penjualan	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	
57	Peramalan laba	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	
58	Peramalan cash flow	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
60	Uraian keg.investasi & riset	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	
61	Peramalan pangsa pasar	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
62	Jumlah karyawan	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	
63	Rincian pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
64	Pelatihan pegawai.	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	
65	Kompensasi /upah min.peg.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
68	Perubahan jumlah pegawai	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
70	Menyediakan pasilitas sosial	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	
71	Mendukung program pemerintah	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
75	Desk.Pel. tugas komite audit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
76	Frek.& kehadiran komite audit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
78	Desk.Pl.Tugas satuan peng.intern	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
79	Uraian tersed.Akses informasi	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
80	Desk.Ttg. Tata kelola perusahaan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH SCORE		32	63	55	56	68	71	69	71	63	66	64	58

No		P71	P72	P73	P74	P75	P76	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84
ITEM	ITEM PENGUNGKAPAN	JPRS	JECC	INDS	INCI	IKAI	IJKP	FMII	FISH	FASW	CLPI	BUDI	BTON	BRPT
1	Sejarah singkat perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Struktur organisasi perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Penj. umum bisnis perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Visi / misi atau tujuan perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Strategi secara umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Strategi secara spesifik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dampak strategi terhadap hasil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	L.Laba rugi perbandingan min 3th	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Neraca perbandingan min.3 th.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ikh.Prb.neraca & laba rugi 5 th	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Ikh.delapan kuartal penj. & laba	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
12	Rasio profitabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
13	Rasio rentabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
14	Rasio likuiditas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	Rasio solvabilitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	Rasio perputaran asset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
17	Nilai tambah	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
18	Laba per saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Perny.keb. dividen 2 th terakhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
20	Penj.dampak inflasi thd hasil-hasil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Pj.damp. fluk.nilai tukar thd hasil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah penjualan dalam unit	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
23	Harga jual per unit	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24	Pertum. Penj.dlm unit min 3 th.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
25	Inf. harga saham min.2 th terakhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Inf.vol.shm yg diperd. 2th akhir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Uraian keg.inves., riset/pengemb.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Deskripsi tentang produk utama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Deskripsi tentang pasar utama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Deskrip. Jaminan kualitas produk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Sertifikasi produk/proses	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Deskripsi pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Deskripsi jaringan pemasaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Nama dan jabatan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Latar blk.pend. & karir komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Nama dan jabatan Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Latar blk. Pend.& karir Direksi .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Remunerasi komisaris/direksi.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
39	Anal. & pemb. Persediaan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
40	Anal. & pemb. piutang usaha	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
41	Anal.&pemb. Aktiva lancar	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
42	Anal.&pemb. Investasi, riset	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
43	Anal.&pemb. Kewajiban lancar	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
44	Anal.&pemb.Kewaj. tdk lancar	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
45	Anal.&pemb. Ekuitas	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

46	Anal.& pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Anal.&pemb. bunga	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
50	Anal &pemb Laba kotor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	Anal.&pemb. Laba usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	Anal.&pemb. Laba bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
54	Pemb.Dampak perub. Harga	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
56	Peramalan penjualan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	Peramalan laba	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	Peramalan <i>cash flow</i>	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
60	Uraian keg.investasi & riset	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
61	Peramalan pangsa pasar	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
62	Jumlah karyawan	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
63	Rincian pegawai	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
64	Pelatihan pegawai.	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
65	Kompensasi /upah min.peg.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
68	Perubahan jumlah pegawai	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1
70	Menyediakan pasilitas sosial	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
71	Mendukung program pemerintah	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
75	Desk.Pel. tugas komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
78	Desk.Pl.Tugas satuan peng.intern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
79	Uraian tersed.Akses informasi	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
80	Desk.Ttg.Tata kelola perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
JUMLAH SCORE		71	72	75	70	70	70	68	53	79	58	77	71	67

No		P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98
ITEM	ITEM PENGUNGKAPAN	ADMG	AISA	ALMI	AQUA	ASII	FISH	MERK	PRAS	PYFA	SKLT	SMSM	SMGR	TOTO
1	Sejarah singkat perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Struktur organisasi perusahaan	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Penj. umum bisnis perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Visi / misi atau tujuan perusahaan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
5	Strategi secara umum	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Strategi secara spesifik	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
7	Dampak strategi terhadap hasil	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
8	L.Laba rugi perbandingan min 3th	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Neraca perbandingan min.3 th.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ikh.Prb.neraca & laba rugi 5 th	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
11	Ikh.delapan kuartal penj. & laba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rasio profitabilitas	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
13	Rasio rentabilitas	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
14	Rasio likuiditas	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
15	Rasio solvabilitas	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
16	Rasio perputaran asset	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Nilai tambah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Laba per saham	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
19	Perny.keb. dividen 2 th terakhir	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20	Penj.dampak inflasi thd hasil-hasil	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
21	Pj.damp. fluk.nilai tukar thd hasil	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Jumlah penjualan dalam unit	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
23	Harga jual per unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pertum. Penj.dlm unit min 3 th.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Inf. harga saham min.2 th terakhir	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
26	Inf.vol.shm yg diperd. 2th akhir	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
27	Uraian keg.inves., riset/pengemb.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
28	Deskripsi tentang produk utama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Deskripsi tentang pasar utama	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30	Deskrip. Jaminan kualitas produk	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
31	Sertifikasi produk/proses	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
32	Deskripsi pangsa pasar	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
33	Deskripsi jaringan pemasaran	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nama dan jabatan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Latar blk.pend. & karir komisaris	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
36	Nama dan jabatan Direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Latar blk. Pend.& karir Direksi .	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
38	Remunerasi komisaris/direksi.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
39	Anal. & pemb. Persediaan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
40	Anal. & pemb. piutang usaha	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
41	Anal.&pemb. Aktiva lancar	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
42	Anal.&pemb. Investasi, riset	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Anal.&pemb. Kewajiban lancar	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
44	Anal.&pemb.Kewaj. tdk lancar	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
45	Anal.&pemb. Ekuitas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1

46	Anal.& pemb. Penjualan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
47	Anal.&pemb. Harga pokok penj.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
48	Anal.&pemb. adm.& pem.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
49	Anal.&pemb. bunga	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
50	Anal &pemb Laba kotor	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
51	Anal.&pemb. Laba usaha	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
52	Anal.&pemb. Laba bersih	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
53	Anal.& pemb. Pangsa pasar	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
54	Pemb.Dampak perub. Harga	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
55	Pemb.hasil yg dicapai dng target	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
56	Peramalan penjualan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Peramalan laba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Peramalan <i>cash flow</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Deskripsi asumsi untuk proyeksi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Uraian keg.investasi & riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Peramalan pangsa pasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Jumlah karyawan	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
63	Rincian pegawai	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
64	Pelatihan pegawai.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
65	Konpensasi /upah min.peg.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Jamsostek/dana pens.karyawan	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
67	Uraian kondisi lingkungan kerja.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
68	Perubahan jumlah pegawai	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
69	Deskripsi.pengend. polusi& ling.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
70	Menyediakan pasilitas sosial	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
71	Mendukung program pemerintah	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
72	Beasiswa sekolah/kuliah/riset	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
73	Desk.Pel.Tugas dewan komisaris	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Frek.pert.& kehadiran komisaris	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
75	Desk.Pel. tugas komite audit	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
76	Frek.& kehadiran komite audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
77	Desk.Pel.Tugas sekr.perusahaan	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
78	Desk.Pl.Tugas satuan peng.intern	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
79	Uraian tersed.Akses informasi	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Desk.Ttg. Tata kelola perusahaan	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
JUMLAH SCORE		34	16	41	41	55	26	30	28	26	24	39	44	36

Lampiran 6 : Kolinieritas

Collinearity Diagnostics

Mode	Dimensi	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				Constant	KI	KDK	UDK	KPDK	AUDIT	_LOGPNJ
1	1	5.968	1.000	.00	.00	.00	.00	.01	.01	.00
	2	.357	4.089	.00	.03	.02	.00	.01	.80	.00
	3	.281	4.607	.00	.06	.02	.09	.64	.00	.00
	4	.184	5.695	.00	.36	.35	.01	.16	.00	.00
	5	.156	6.189	.00	.22	.12	.44	.17	.08	.00
	6	.048	11.135	.10	.32	.48	.38	.01	.02	.05
	7	.006	30.800	.90	.00	.00	.08	.00	.08	.95

a. Dependent Variable: ML

LAMPIRAN 7 : Daftar Pengungkapan Sukarela

(P.1) Informasi sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan

1. Sejarah singkat perusahaan. (a,b,c,d,e)*
2. Struktur organisasi perusahaan (a,b,c,d,e)*
3. Penjelasan umum tentang bisnis perusahaan (d)*

(P.2) Deskripsi Strategi Perusahaan.

4. Visi / misi atau tujuan perusahaan. (a,b,c,d)
5. Strategi perusahaan secara umum (a,b,c,d,e)*
6. Strategi perusahaan secara spesifik atas aspek produksi/pemasaran/finansial social. (b,d)*
7. Dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang, atau terhadap hasil-hasil pada masa yang akan datang.(b,d)*

(P.3) Ikhtisar kinerja Keuangan Perusahaan**.

8. Laporan yang memuat elemen laba rugi yang diperbandingkan minimal 3 tahun terakhir.(a,b,c,d,e)*
9. Laporan yang memuat elemen neraca yang diperbandingkan minimal 3 tahun terakhir.(a,b,c,d,e)*
10. Ikhtisar yang memuat elemen neraca dan laba rugi yang dapat diperbandingkan untuk 5 tahun atau lebih. (a,b,c,d,e)*
11. Ikhtisar untuk delapan kuartal(triwulan) terakhir penjualan dan laba. (e)
12. Rasio profitabilitas.(a,b,d)*
13. Rasio rentabilitas.(a,b,d)*
14. Rasio likuiditas. (a,b,d)*
15. Rasio solvabilitas. (a,b,d)*
16. Rasio perputaran asset. (a,b,d)*

17. Nilai tambah dapat secara kualitatif atau kuantitatif (b,d)*
18. Laba per saham perusahaan. (a,b,d)*
19. Pernyataan mengenai kebijakan dividen selama dua tahun buku terakhir.(a,b,d)* LK.
20. Penjelasan dampak inflasi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.(b,d)
21. Penjelasan dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing (\$) terhadap hasil yang dicapai/operasi perusahaan. (b,d)
22. Jumlah penjualan dalam unit. (e)
23. Harga jual per unit. (e)
24. Pertumbuhan penjualan dalam unit minimal tiga tahun terakhir (e)*
25. Informasi harga saham minimal dalam dua tahun terakhir atau sejak didirikan.(a).
26. Informasi jumlah/volume saham yang diperdagangkan dalam dua tahun terakhir atau sejak didirikan.(a)
27. Uraian mengenai kegiatan investasi, pengeluaran modal dan atau kegiatan riset/ pengembangan yang telah dilaksanakan perusahaan.(a,b,d)*

(P.4).Kualitas Produk dan Jaringan Pemasaran

28. Deskripsi tentang produk utama perusahaan. (b,c,d)*
29. Deskripsi tentang pasar utama dari produk perusahaan. (b,c,d) *
30. Jaminan kualitas produk . (b,c,d)
31. Sertifikasi produk/proses tingkat nasional atau internasional.(a,c)
32. Deskripsi pangsa pasar perusahaan. (b,c,d)
33. Deskripsi jaringan pemasaran perusahaan. (b,c,d)

(P.5) Informasi Latar Belakang Komisaris dan Direksi Perusahaan.

34. Nama dan jabatan Komisaris. (a)
35. Latar belakang pendidikan dan karir komisaris.(a,c)
36. Nama dan jabatan Direksi.(a)
37. Latar belakang pendidikan karir Direksi.(a,c)
38. Remunerasi komisaris/direksi.(a,c)

(P.6) Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja perusahaan.**

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, serta pembahasan atas :

39. Persediaan. (a,c).*
40. Piutang usaha.(a,c)*
41. Aktiva lancar/rek.aktiva lancar lainnya.(a,c)*
42. Investasi, pengeluaran modal dan atau riset pengembangan.(,c)*
43. Kewajiban lancar. (a,c)*
44. Kewajiban tidak lancar. (a,c)* LK apakah ada perubahan (y/t)
45. Ekuitas. (a,c)*
46. Penjualan. (a,c)*
47. Harga pokok penjualan. (a,c)*
48. Beban administrasi dan pemasaran. (a,c)*

49. Beban bunga atau pendapatan bunga.(a,c)*

50. Laba kotor. (a,c)*

51. Laba usaha. (a,c)*

52. Laba bersih. (a,c)*

53. Pangsa pasar. (a,c)*

Bahasan manajemen atas :

54.Dampak perubahan harga terhadap penjualan serta laba operasi perusahaan.(c)

55.Perbedaan antara hasil-hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan atau dianggarkan (d)

(P.7) Informasi tentang proyeksi dan prospek bisnis.**

56. Peramalan penjualan dapat secara kualitatif atau kuantitatif.(c,d)*

57. Peramalan (proyeksi) laba dapat secara kualitatif atau kuantitatif.(c,d)*

58. Peramalan *cash flow* dapat secara kualitatif atau kuantitatif. (c,d)*

59. Deskripsi asumsi yang mendasari proyeksi yang dibuat perusahaan.(c,d)*

60. Uraian mengenai kegiatan investasi/pengeluaran modal dan atau kegiatan riset / pengembangan yang akan dilaksanakan perusahaan (a,b,c,d)*

61. Peramalan pangsa pasar dapat secara kualitatif atau kuantitatif .(a,b,c,d)*

(P.8) Informasi karyawan.

62. Jumlah karyawan. (a,b,c,d,e)*

63. Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan /kompetensi.(a,b,c,d,e)

64. Pelatihan (training) pegawai.(b,c,d)

65. Kompensasi dan upah minimum pegawai.(b,c,d,e)*

66. Jaminan sosial tenaga kerja/dana pension karyawan.(b,c,d)

67.Uraian kondisi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.(b,d)

68.Perubahan jumlah pegawai, penjelasan mengenai perubahan jumlah pegawai (b,d)

(P.9) Kebijakan dan Tanggung jawab sosial.

69.Deskripsi pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan dapat secara kualitatif atau kuantitatif .(b,d)

70. Menyediakan /membangun fasilitas sosial di lingkungan perusahaan.(b,c)

71. Mendukung program pemerintah di bidang sosial/kesehatan masyarakat /kegiatan olah raga.(b,c)

72. Beasiswa sekolah/kuliah/riset.(c)

(P.10) Informasi Tata Kelola Perusahaan.

73. Deskripsi pelaksanaan tugas dewan komisaris.(a)

74. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komisaris.(a)

75. Deskripsi pelaksanaan tugas komite audit (a,c)

76. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.(a,c)*

77. Deskripsi tentang keberadaan dan tugas sekretaris perusahaan.(a)

78. Deskripsi tentang keberadaan dan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.(a)
79. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik misalnya melalui *website*, media masa, *mailing list*, buleting , dll.
(a)
80. Pernyataan atau deskripsi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada operasi perusahaan. (a,c)*
-

Keterangan :

1. Sumber referensi :
(a) Bapepam, (b) Chau and Gray, (c) Utami, (d) Suropto, (e) Botosan
2. * = Model Eng dan Mak (2003) dalam *Corporate governance and voluntary disclosure* .
3. ** = Pengungkapan Sukarela Finansial (PS.FN)



Utami
UNIVERSITAS WIDYATAMA